

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya globalisasi. Pola-pola lama dalam penyelenggaraan pemerintahan sudah tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang saat ini berubah. Oleh karenanya, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh Pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah, pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah maka daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Konsekuensi dari pelaksanaan undang-undang tersebut adalah bahwa Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memiliki Rencana Strategis (Renstra). Renstra SKPD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dinas/badan/kantor dan perangkat-perangkat daerah lainnya. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (LAKIP).

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Karanganyar sebagai salah satu instansi pemerintah daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian BAPPEDA perlu menyusun suatu rencana strategis agar dapat menentukan arah perkembangan organisasi dan meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Rencana Strategis (Renstra) yang disusun oleh Bappeda merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting untuk memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi. Rencana strategis disusun untuk jangka waktu lima tahun, dan diimplementasi ke dalam rencana kerja (Renja) tahunan.

Dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 – 2018 dan dengan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar, maka perlu disusun Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 – 2018.

1.2 Landasan Hukum

Beberapa peraturan perundangan yang melandasi penyusunan Renstra dan Renja SKPD adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- j. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- l. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

RENSTRA BAPPEDA adalah dokumen perencanaan resmi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2013 sampai tahun 2018, disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil BAPPEDA Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Karanganyar terutama terkait monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan
3. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan
4. Memberikan arah dalam melayani masyarakat sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen aparatur BAPPEDA dalam mewujudkan Visi Misi yang telah disepakati bersama

Adapun tujuan penyusunan RENSTRA BAPPEDA Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 – 2018 adalah untuk :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelayanan masyarakat serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja BAPPEDA sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah
2. Mengembangkan kerangka pemikiran kreatif dengan sikap dan tindakan proaktif yang berorientasi pada keberhasilan secara sistemik di masa depan
3. Meningkatkan komunikasi antara para pemangku kepentingan/multi pihak dalam pelayanan terkait perencanaan pembangunan daerah
4. Memberikan pedoman bagi penyusunan Renca Kerja Tahunan BAPPEDA yang memuat program dan kegiatan.

Kedudukan Renstra sebagai pedoman dan arah dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsi BAPPEDA dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.

Pelayanan kepada masyarakat di bidang Perencanaan Pembangunan tidak terlepas dari hierarki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2018. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, BAPPEDA diamanatkan menyusun Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

RENSTRA BAPPEDA Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BAPPEDA
- 2.2 Sumber Daya BAPPEDA
- 2.3 Kinerja Pelayanan BAPPEDA
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BAPPEDA

- BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**
 - 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BAPPEDA**
 - 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**
 - 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD**
 - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**
 - 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

- BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN**
 - 4.1 Visi dan Misi BAPPEDA**
 - 4.1.1 Visi BAPPEDA**
 - 4.1.2 Misi BAPPEDA**
 - 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA**
 - 4.3 Strategi dan Kebijakan BAPPEDA**

- BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

- BAB VI INDIKATOR KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

- BAB VII PENUTUP**

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
KABUPATEN KARANGANYAR

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BAPPEDA

Tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 BAB III tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi dan Susunan Organisasi Pasal 3 yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Selain melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 76 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar, sebagai berikut :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - b. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :
 - 1) Perumusan kebijakan teknis di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 2) Pengkoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi penelitian, pengembangan dan statistik, ekonomi, sosial budaya dan fisik prasarana serta kesekretariatan
 - 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang meliputi penelitian, pengembangan dan statistik, ekonomi, sosial budaya dan fisik prasarana serta kesekretariatan
 - 4) Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian di lingkungan Badan.

3. Kepala Sub Bagian Perencanaan

Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyusun program kegiatan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan Badan.

4. Kepala Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan administrasi keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan Badan.

5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum, rumah tangga, perlengkapan/perbekalan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan, serta pengelolaan administrasi kepegawaiab Badan.

6. Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan

Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan di Bidang Penelitian dan Pengembangan.

7. Kepala Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Statistik

Kepala Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Statistik mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan di Bidang Monitoring, Evaluasi dan Statistik.

8. Kepala Bidang Ekonomi

Kepala Bidang Ekonomi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di Bidang Ekonomi.

9. Kepala Sub Bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan Pengembangan Dunia Usaha

Kepala Sub Bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan Pengembangan Dunia Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Ekonomi dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan di Bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan Pengembangan Dunia Usaha.

10. Kepala Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Pertambangan dan Energi

Kepala Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Pertambangan dan Energi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Ekonomi dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan di Bidang Pertanian, Kehutanan, Pertambangan dan Energi

11. Kepala Bidang Sosial Budaya

Kepala Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di Bidang Sosial Budaya.

12. Kepala Sub Bidang Pemerintahan, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat

Kepala Sub Bidang Pemerintahan, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sosial Budaya dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan di Bidang Pemerintahan, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat

13. Kepala Sub Bidang Agama, Pendidikan, Kebudayaan dan Kesejahteraan Rakyat

Kepala Sub Bidang Agama, Pendidikan, Kebudayaan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sosial Budaya dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan

kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan di Bidang Agama, Pendidikan, Kebudayaan dan Kesejahteraan Rakyat

14. Kepala Bidang Fisik Prasarana

Kepala Bidang Fisik Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di Bidang Fisik Prasarana

15. Kepala Sub Bidang Prasarana Wilayah, Pemukiman dan Pariwisata

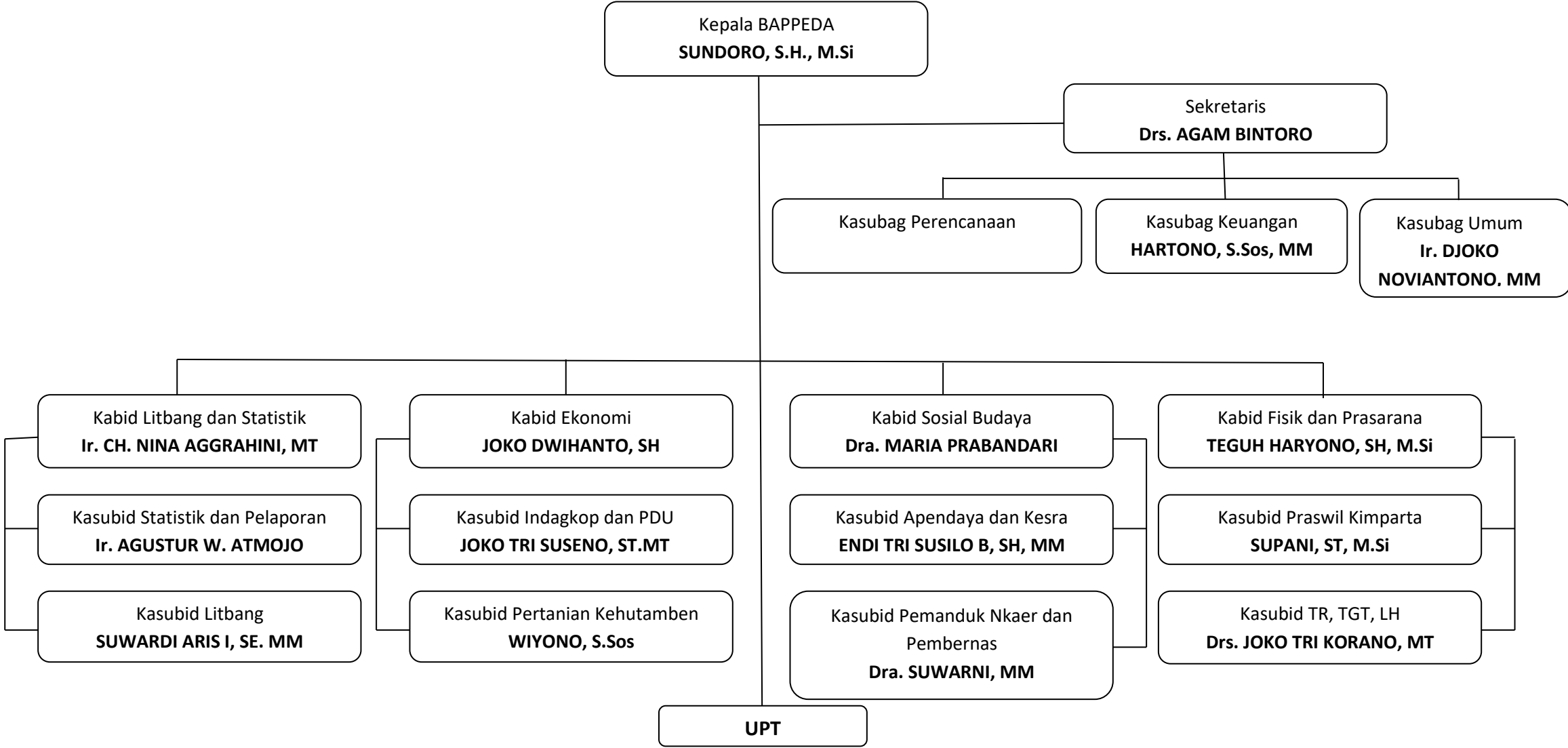
Kepala Sub Bidang Prasarana Wilayah, Pemukiman dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Fisik Prasarana dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan di Bidang Prasarana Wilayah, Pemukiman dan Pariwisata

16. Kepala Sub Bidang Tata Ruang, Tata Guna Tanah, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam

Kepala Sub Bidang Tata Ruang, Tata Guna Tanah, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Fisik Prasarana dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan di Bidang Tata Ruang, Tata Guna Tanah, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam

Struktur Organisasi BAPPEDA

Gambar 2.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2014



2.2 Sumber Daya BAPPEDA

Jumlah pegawai di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar sebanyak 43 orang, dengan daftar rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Daftar Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Karanganyar

NO	NAMA/NIP	JABATAN
1	2	3
1.	SUNDORO, S.H., M.Si. 19610512 198812 1 001	Kepala BAPPEDA
SEKRETARIAT		
2.	Drs. AGAM BINTORO 19650601 199203 1 007	Sekretaris BAPPEDA
3.	Ir. DJOKO NOVIANTONO, M.M. 19591102 198603 1 007	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4.	SISWANTO 19610630 198703 1 007	Pengadministrasian Kepegawaian pada Subbag Umum dan Kepegawaian
5.	LUCIA KUSWITIYARSI, S.Sos. 19600619 198503 2 002	Resepsionis pada Subbag Umum dan Kepegawaian
6.	PONIMAN 19620223 198503 1 010	Pengadministrasi Inventarisasi Barang pada Subbag Umum dan Kepegawaian
7.	GUNAWAN WIBISONO 19691013 200703 1 019	Pengadministrasi Umum pada Subbag Umum dan Kepegawaian
8.	SUKIMAN 19790423 200801 1 016	Caraka pada Subbag Umum dan Kepegawaian
9.	HARTONO, S.Sos., M.M. 19691015 199003 1 007	Kepala Sub Bagian Keuangan
10.	AHMAD FAJAR ISNAINI, S.E. 19670925 199401 1 003	Verifikator Keuangan pada Subbag Keuangan
11.	RITA HERMAWATI, S.P. 19710416 199603 2 002	Juru Bayar Gaji pada Subbag Keuangan
12.	SARIMAN 19721204 200701 1 023	Bendaharawan Pengeluaran pada Subbag Keuangan
13.	YOHANA SUSANTO, S.E. 19780723 200902 2 003	Pengadministrasi Keuangan pada Subbag Keuangan
14.	-	Kepala Sub Bagian Perencanaan
15.	SRI SUDARWATI, S.P. 19820602 200604 2 016	Penyusun Program dan Laporan pada Subbag Perencanaan
16.	RANI WIDYA LESTARI, S.E. 19820610 201001 2 031	Penyusun Program dan Laporan pada Subbag Perencanaan
BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK		
17.	Ir. CHATARINA NINA ANGGRAHINI, M.T. 19640414 199203 2 006	Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik
18.	Ir. AGUSTUR WAHYUNING ATMOJO 19580831 199303 1 001	Kepala Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Statistik
19.	SUSWAN CHRISTIONO, S.E. 19840920 200902 1 004	Penyiap Monitoring dan Evaluasi pada Subbid. Monitoring, Evaluasi dan Statistik
20.	S. ARIS INDRIYATMOKO, S.E., M.M. 19660102 199803 1 003	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan
21.	EDY SUYATNO, S.Sos. 19651212 199303 1 012	Penyiap Bahan Rencana dan Program Penelitian pada Subbid. Penelitian dan Pengembangan
22.	ADIT KURNIAWAN HARIYANTA, A.Md. 19841120 201001 1 018	Penyiap Bahan Rencana dan Program Penelitian pada Subbid. Penelitian dan Pengembangan
BIDANG EKONOMI		
23.	JOKO DWIHANTO, S.H. 19581123 198503 1 004	Kepala Bidang Ekonomi

NO	NAMA/NIP	JABATAN
1	2	3
24.	WIYONO, S.Sos., M.Si. 19670503 198903 1 010	Kepala Sub Bidang Pertanian Kehutamben
25.	JOKO TRI SUSENO, S.T., M.T. 19671121 199911 1 001	Kepala Sub Bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan Pengembangan Dunia Usaha
26.	NUGROHO DWI SAPUTRO, S.E. 19840920 200902 1 004	Analisis Perencanaan pada Subbid. Industri, Perdagangan, Koperasi dan Pengembangan Dunia Usaha
27.	ARLINTA YUNIATI, A.Md. 19870619 201001 2 016	Analisis Perencanaan pada Subbid. Industri, Perdagangan, Koperasi dan Pengembangan Dunia Usaha
BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA		
28.	Dra. MARIA PRABANDARI 19621116 199203 2 004	Kepala Bidang Sosial dan Budaya
29.	ENDI TRISUSILO BUDI, S.H., M.M. 19580312 198703 1 004	Kepala Sub Bidang Agama, Pendidikan, Kebudayaan dan Kesejahteraan Rakyat
30.	DODIK SETYO WIARTO, S.E. 19760202 200902 1 003	Analisis Perencanaan pada Subbid. Agama, Pendidikan, Kebudayaan dan Kesejahteraan Rakyat
31.	PURWOKO JOKO SARONO 19700830 200801 1 003	Analisis Perencanaan pada Subbid. Agama, Pendidikan, Kebudayaan dan Kesejahteraan Rakyat
32.	Dra. SUWARNI, M.M. 19620404 199103 2 006	Kepala Sub Bidang Pemerintahan, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat
33.	MULADI, S.E. 19621012 198901 1 001	Analisis Perencanaan pada Subbid. Pemerintahan, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat
34.	SUYONO, S.E. 19590102198503 1 013	Analisis Perencanaan pada Subbid. Pemerintahan, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat
35.	DIDIK HARI PRAHASTA, S.E. 19810904 201001 1 012	Analisis Perencanaan pada Subbid. Pemerintahan, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat
BIDANG FISIK DAN PRASARANA		
36.	TEGUH HARYONO, S.H., M.Si. 19670210 198603 1 003	Kepala Bidang Fisik dan Prasarana
37.	Drs. JOKO TRIKORANO, M.T. 19630612 199309 1 001	Kepala Sub Bidang Tata Ruang, Tata Guna Tanah, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam
38.	SUPANI, S.T., M.Si. 19680626 199703 2 008	Kepala Sub Bidang Prasarana Wilayah, Pemukiman dan Pariwisata
39.	VIRA AGUSTINA WULANDARI, S.T., M.M. 19710830 200501 2 006	Analisis Perencanaan pada Subbid. Prasarana Wilayah, Pemukiman dan Pariwisata
40.	M. IRSYAD BAIQUNI, S.T. 19750123 200604 1 006	Analisis Perencanaan pada Subbid. Prasarana Wilayah, Pemukiman dan Pariwisata
PEJABAT FUNGSIONAL KHUSUS		
41.	M. HIDAYAT RUSYADI, S.Hut., M.T. 19750912 200003 1 004	Calon Perencana pada BAPPEDA
42.	TRIO HARTONO, S.E. 19781030 200902 1 001	Calon Perencana pada BAPPEDA
43.	ALEK YULIANTO, S.Si. 19770706 201001 1 012	Calon Perencana pada BAPPEDA
44.	ITA SARI RATNAWATI, S.Si. 19820610 201001 2 031	Calon Perencana pada BAPPEDA

Tabel 2.2.
Kualifikasi Pendidikan Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Karanganyar Tahun 2014

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	SD	1
2.	SLTP	-
3.	SLTA	5
4.	D1	-
5.	D3	2
6.	S1	20
7.	S2	15
8.	S3	-
Jumlah		43

Tabel 2.3.
Pangkat dan Golongan Pegawai
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Karanganyar Tahun 2014

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1.	I. a	-
	. b	1
	c	-
	d	-
2.	II. a	-
	b	3
	c	1
	d	-
3.	III. a	-
	b	14
	c	5
	d	6
4.	IV. a	11
	b	1
	c	1
Jumlah		43

Tabel 2.4.
 Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Kabupaten Karanganyar Tahun 2014

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Menurut Jabatan	
	A. Struktural	
	Eselon II	1
	Eselon III	5
	Eselon IV	11
	B. Fungsional	-
	C. Staf	26
	Jumlah	43
2.	Menurut Golongan	
	Golongan IV	13
	Golongan III	25
	Golongan II	4
	Golongan I	1
	Jumlah	43
3.	Menurut Pendidikan	
	Strata 3	-
	Strata 2	15
	Strata 1	20
	Sarmud/Diploma 3	2
	Diploma 1	-
	SLTA	5
	SLTP	-
	SD	1
	Jumlah	43

2.3 Kinerja Pelayanan BAPPEDA

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang secara langsung menangani sektor perencanaan pembangunan Kabupaten Karanganyar dalam hal ini berkewajiban menyajikan Laporan Pelaksanaan Tugas Unit Kerja Tahunan yang menjelaskan pelaksanaan kegiatan selama satu tahun anggaran sebagai manifestasi pertanggungjawaban Kepala BAPPEDA sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisis Pamong Praja Kabupaten Karanganyar.

Konsep penentuan kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah dipersiapkan dan disusun oleh BAPPEDA dengan melibatkan dinas / instansi / unit kerja, legislatif (*stake holder*) melalui koordinasi dan sinkronisasi kegiatan yang terpola dan terpadu dengan menyerap aspirasi masyarakat luas.

Pemantapan sistem perencanaan pembangunan daerah ditempuh dengan mengedepankan partisipasi aktif *stakeholders* agar mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang bersifat komprehensif, dan holistik atau menyeluruh, sehingga mampu memberikan arah kebijaksanaan pembangunan dan menciptakan iklim kondusif bagi keterlibatan aktif *stakeholders* dalam keseluruhan proses pembangunan daerah. SDM perencana pembangunan menjadi sangat penting, dan menjadi kunci keberhasilan proses perencanaan pembangunan. Kualitas perencanaan sangat tergantung pada kemampuan dan keahlian para perencana secara teknis maupun kemampuan lain yang bersifat intersektoral, multidisipliner, dan berpikir komprehensif. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia merupakan peningkatan kapasitas individu dalam mengemban beban tugas masing-masing dalam organisasi.

Peningkatan profesionalisme merupakan upaya peningkatan kinerja berkait dengan kesetiaan, logika dan etika.

Secara umum, kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu lima tahun terakhir kualitasnya semakin mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, LSM, lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi dan sektor swasta
2. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif
3. Terselenggaranya forum SKPD dan gabungan SKPD
4. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran
5. Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat kecamatan oleh BAPPEDA dan SKPD terkait.
6. Meningkatnya kualitas manajemen perencanaan pembangunan meliputi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan bidang fisik prasarana serta perencanaan tata ruang.
7. Meningkatnya ketersediaan data statistik sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan daerah.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan BAPPEDA, meliputi kapasitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, di antaranya :

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional.

2. Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan, meliputi : *master plan*, *grand design*, RDTRK, RTRW, data base serta hasil kajian sektor lainnya sebagai bahan pendukung perencanaan.
3. Fasilitasi berbagai forum *multistakeholders* di bidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya.
4. Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis dan terpadu antara lain melalui *Focus Group Discussion (FGD)*.
5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.
6. Tersusunnya bahan perencanaan di bidang penelitian, pengembangan dan statistik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya dan bidang fisik prasarana.
7. Ketersediaan data statistik sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan daerah
8. Terfasilitasinya penelitian di tingkat Perguruan Tinggi
9. Peningkatan kualitas penataan ruang, yang ditandai dengan meningkatnya koordinasi penataan ruang dalam rangka kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Jenis pelayanan yang diberikan oleh BAPPEDA Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah mempersiapkan rumusan kebijakan teknis perencanaan, mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah baik dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di tingkat Pemerintah Kabupaten Karanganyar maupun dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, memberikan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal informasi perencanaan pembangunan daerah.

Secara rinci jenis pelayanan yang diberikan BAPPEDA adalah pemberian informasi dan pemikiran strategis berbasis perencanaan, yang meliputi :

1. Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terukur
2. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
3. Penjaringan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah
4. Peningkatan kompetensi SDM aparatur perencana
5. Memfasilitasi keterpaduan dan keserasian perencanaan pembangunan secara vertikal yakni antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, maupun horizontal yakni antar SKPD
6. Meningkatkan mekanisme kerja perencanaan secara sinergi, transparan dan terkoordinasi
7. Memberikan informasi potensi pembangunan dan data serta informasi pembangunan

Berdasarkan aspek pelayanan yang diberikan BAPPEDA, maka yang menjadi target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya, sebagai berikut :

1. Unsur Pimpinan (Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah) dalam hal memberikan pemikiran strategis di bidang perencanaan
2. SKPD dalam hal penyediaan panduan program dan kegiatan serta fasilitasi sinkronisasi dan integrasi program
3. Pemangku kepentingan dalam hal menjaring aspirasi dan partisipasi dalam perencanaan pembangunan serta penyediaan informasi pembangunan
4. Aparatur BAPPEDA dalam hal penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BAPPEDA

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan daerah belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok, antara lain sebagai berikut :

1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan
2. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan.
3. Munculnya berbagai kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan pembangunan di daerah
4. Belum mantapnya mekanisme perencanaan antara BAPPEDA dengan SKPD dan antar SKPD.
5. Perubahan paradigma perencanaan pembangunan yang menuntut perencana sebagai fasilitator dan mediator yang menata inisiatif masyarakat
6. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana.
7. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku nerabas (*shortcutting*).
8. Pada internal birokrasi, adanya lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar SKPD, rendahnya kapasitas dan komitmen SKPD pada proses perencanaan, rendahnya kapasitas fiskal pemerintah daerah yang berakibat pada lebarnya celah fiskal (*fiscal gap*).
9. Pada internal BAPPEDA, belum mampu menyediakan alat-alat praktis analisis kelayakan kegiatan yang kredibel, belum meratanya kapasitas analitik sumber daya manusia perencana, belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan

komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian perencanaan pembangunan daerah.

Selain tantangan seperti tersebut di atas, dalam mengembangkan pelayanannya BAPPEDA mempunyai peluang, antara lain :

1. Adanya regulasi yang jelas, yang mengatur peran BAPPEDA di daerah
2. Komitmen Kepala Daerah untuk memperkuat *good governance* dalam bidang perencanaan
3. Adanya PERDA tentang perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RTRW)

Untuk menjawab tantangan dan peluang tersebut, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, BAPPEDA Kabupaten Karanganyar diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas. Pendekatan yang diambil adalah melalui perencanaan partisipatif yang diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BAPPEDA

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2001 BAB III tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal III BAPPEDA mempunyai :

a. Tugas Pokok :

- Membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah

b. Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah.
2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi penelitian, pengembangan dan statistik, ekonomi, sosial budaya dan fisik prasarana serta kesekretariatan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan di bidang perencanaan pembangunan daerah yang meliputi penelitian, pengembangan dan statistik, ekonomi, sosial budaya dan fisik prasarana serta kesekretariatan.
4. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berkaitan dengan kedudukan, tugas dan fungsi BAPPEDA tersebut dapat diketahui beberapa isu-isu strategis yang seringkali dihadapi oleh BAPPEDA, diantaranya ialah :

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan. Posisi politik pemerintah (eksekutif) saat ini yang “kalah” jika dibandingkan dengan lembaga legislatif. Posisi demikian sering mengacaukan hasil perencanaan pembangunan.
2. Belum mantapnya mekanisme perencanaan antara BAPPEDA dengan SKPD dan antar SKPD. Hal ini disebabkan belum adanya kesepahaman pengertian dan teknis penyusunan rencana di hampir semua SKPD.

3. Mengendurnya semangat masyarakat terlibat dalam proses perencanaan pembangunan akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana.
4. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku nerabas (*shortcutting*).
5. Pada internal birokrasi, adanya lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar SKPD, rendahnya kapasitas dan komitmen SKPD pada proses perencanaan, rendahnya kapasitas fiskal pemerintah daerah yang berakibat pada lebarnya celah fiskal (*fiscal gap*).
6. Pada internal BAPPEDA, belum mampu menyediakan alat-alat praktis analisis kelayakan kegiatan yang kredibel, belum meratanya kapasitas analitik sumber daya manusia perencana, belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian perencanaan pembangunan daerah.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karanganyar terpilih untuk masa jabatan 2013 – 2018 membawa visi dan misi baru, sebagai dasar dalam upaya memberikan perubahan serta kemajuan bagi Kabupaten Karanganyar.

Visi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karanganyar terpilih adalah **“Bersama Memajukan Karanganyar”**

Misi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karanganyar terpilih adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh
Pembangunan fisik dan infrastruktur yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan lainnya. Pembangunan infrastruktur diarahkan pada sarana dan prasarana untuk meningkatkan pertumbuhan dan kelancaran roda perekonomian dengan memperhatikan aspek keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup, serta tata ruang daerah
2. Penciptaan 10.000 Wirausahawan Mandiri
Berkurangnya pekerjaan pada perusahaan mengakibatkan banyaknya angkatan kerja yang tidak tertampung, pada hal fenomena ini di setiap tahun mengalami peningkatan. Maka untuk mengurangi angka

pengangguran perlu ditumbuhkan semangat untuk berusaha mandiri di samping untuk diri pribadinya diharapkan dapat membuka lapangan kerja. Usaha mandiri dapat dilakukan di beberapa sektor pertanian, peternakan, jasa dan lain sebagainya. Maka peran pemerintah untuk menciptakan wirausahawan mandiri dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan teknologi tepat guna, pemasaran dan bantuan stimulan sebagai modal awal untuk membuka usaha.

3. Pendidikan Gratis SD, SMP, SMA dan Kesehatan Gratis

Seperti diamanatkan dalam UUD 1945 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, maka dengan kebijakan wajib belajar bagi masyarakat pemerintah dapat memberikan kesempatan pada setiap warganya untuk mengenyam pendidikan. Kesulitan ekonomi yang menghambat warga yang wajib belajar dapat teratasi dengan mengoptimalkan anggaran yang ada guna memberikan pendidikan gratis. Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, maka pemerintah sudah selayaknya menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang baik serta memadai.

4. Pembangunan Desa sebagai Pusat Pertumbuhan

Desa merupakan pusat pemerintahan terbawah, maka sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus baik pembangunan fisik maupun non fisik. Perekonomian harus digalakkan dari desa, tersedianya sumber daya aparat yang baik, serta terciptanya kesatuan dan persatuan kehidupan masyarakat.

5. Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial dan Budaya

Perbedaan keyakinan bukan menjadi keretakan memudarnya semangat kehidupan kekeluargaan di masyarakat. Perbedaan merupakan rahmat yang harus disyukuri. Hal ini akan menumbuhkan rasa saling hormat menghormati. Peningkatan kualitas keagamaan, sosial dan budaya maka akan dapat menumbuh kembangkan semangat kekeluargaan serta persatuan dan kesatuan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar sendiri memiliki Visi ***“Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang selaras, terpadu, menyeluruh dan berkelanjutan dalam Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Daerah”***. Dengan mengacu pada visi tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Karanganyar mempunyai misi, sebagai berikut :

1. Mewujudkan Perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan tujuan pembangunan nasional dan provinsi.

2. Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang mensinergikan semua bidang pembangunan.
3. Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang melingkupi semua bidang pembangunan.
4. Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang berkesinambungan.

Mengacu Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karanganyar terpilih, program-program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan butir misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang ke 1, 2, 3 dan 4 adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan Insfratraktur Menyeluruh

Indikasi program yang dapat dilaksanakan untuk menunjang visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karanganyar terpilih, antara lain melalui :

- 1) Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur : yang berkaitan dengan pengadaan, pemeliharaan dan pembangunan gedung perkantoran, barang-barang inventaris serta kendaraan dinas.
- 2) Program Pengembangan Data/Informasi ; program dalam rangka menyediakan data / informasi yang dibutuhkan baik untuk evaluasi maupun perencanaan pembangunan.
- 3) Program Perencanaan Pembangunan Daerah, melalui Kegiatan – kegiatan pembuatan dokumen perencanaan pembangunan yang diwajibkan oleh Peraturan perundang-undangan.
- 4) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam yang memuat beberapa keigatn yang berkaitan dengan penyediaan dokumen perencanaan infrastruktur maupun penataan ruang.

2. Penciptaan 10.000 Wirausahawan Mandiri

Indikasi program yang dapat dilaksanakan untuk menunjang visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karanganyar terpilih, antara lain melalui :

- 1) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, melalui kegiatan Forum Pengembangan Ekonomi Daerah dan Penciptaan Lapangan Kerja (FEDEP), yaitu dengan pengembangan kewirusahaan dan peningkatan kesempatan kerja melalui pembinaan klaster Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang mandiri dan terfasilitasinya kegiatan klaster binaan.

2) Program Perencanaan Pembangunan Daerah, melalui Kegiatan – kegiatan pembuatan dokumen perencanaan pembangunan yang diwajibkan oleh Peraturan perundang-undangan.

3. Pendidikan Gratis SD, SMP, SMA dan Kesehatan Gratis

Indikasi program yang dapat dilaksanakan untuk menunjang visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karanganyar terpilih, antara lain melalui :

1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah, melalui Kegiatan – kegiatan pembuatan dokumen perencanaan pembangunan yang diwajibkan oleh Peraturan perundang-undangan.

2) Program Perencanaan Sosial dan Budaya yang mencakup beberapa kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan. Diantaranya adalah Pendidikan Untuk Semua, Kabupaten Sehat, Bantuan KKN,

4. Pembangunan Desa sebagai Pusat Pertumbuhan

Indikasi program yang dapat dilaksanakan untuk menunjang visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karanganyar terpilih, antara lain melalui :

1) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, melalui kegiatan Forum Pengembangan Ekonomi Daerah dan Penciptaan Lapangan Kerja (FEDEP), yaitu dengan pengembangan kewirusahaan dan peningkatan kesempatan kerja melalui pembinaan klaster Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang mandiri dan terfasilitasinya kegiatan klaster binaan.

2) Program Perencanaan Sosial Budaya, melalui Kegiatan Sosialisasi Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, Fasilitasi Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK) / *Neighbourhood Development* (ND), TMMD.

5. Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial dan Budaya

Indikasi program yang dapat dilaksanakan untuk menunjang visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karanganyar terpilih, antara lain melalui :

a. Program Perencanaan Sosial Budaya, melalui Kegiatan Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH; Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD

Institusi perencana di tingkat pusat maupun daerah bertanggung jawab untuk menghasilkan rencana pembangunan berdasarkan proses perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan dimaksud dimulai dari daerah hingga tingkat nasional, yang melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Dalam rangka mengintegrasikan, memadukan, dan mensinergikan perencanaan antar daerah, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi serta mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dilakukan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat, serta menggunakan sumber daya secara efektifm efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD yang mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karanganyar terpilih, juga menyelaraskan dengan program dan kegiatan yang ada di BAPPENAS, sebagai institusi perencana di tingkat pusat.

Sasaran yang telah ditetapkan oleh BAPPENAS sebagai berikut :

1. Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi pemerintah, maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
2. Terlaksananya penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan dengan kebijakan pembangunan

Dalam pelaksanaannya sinergitas program dan kegiatan Pemerintah Pusat sebagaimana disusun oleh BAPPENAS dengan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang disusun oleh BAPPEDA masih terdapat kendala terkait dinamika perubahan lingkungan strategis, diantaranya :

1. Masih terdapat Peraturan Perundang-undangan yang belum sepenuhnya terintegrasi secara baik sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah
2. Keterbatasan kapasitas sumber daya perencana pembangunan di daerah
3. Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah masih menimbulkan penafsiran yang beragam. Hal ini menimbulkan dampak yang menghambat upaya mensinergikan program-program pembangunan antar daerah serta antara pusat dan daerah

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penataan Ruang Wilayah di Kabupaten Karanganyar mempunyai tujuan mewujudkan Kabupaten Karanganyar yang maju, berdaya saing, sejahtera dan bermartabat sebagai daerah perbatasan Jawa Tengah di bagian timur melalui pengembangan potensi kegiatan utama industri, pertanian dan pariwisata, dengan mengedepankan keseimbangan pembangunan dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Permasalahan di bidang penataan ruang, antara lain :

1. Belum lengkapnya peraturan perundangan pelaksanaan penataan ruang di daerah
2. Rencana tata ruang belum sepenuhnya dijadikan acuan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah dan rencana pembangunan sektor
3. Masih lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang
4. Masih lemahnya kepastian hukum dan koordinasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang

BAPPEDA sesuai dengan tugas dan fungsinya berkewajiban mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul di bidang penataan ruang dan lingkungan hidup. Melalui program dan kegiatan yang ada dilakukan penyusunan dokumen tata ruang dan dokumen perencanaan yang terkait dengan lingkungan hidup yang akan menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Dalam rangka mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah disusun kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten, yang meliputi :

1. Percepatan perwujudan fungsi dan peran pusat-pusat perkotaan yang telah ditetapkan, yang dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas
2. Pembangunan prasarana utama untuk meningkatkan aksesibilitas, produksi, produktivitas, koleksi dan distribusi, serta mewujudkan keterpaduan antar wilayah di kabupaten dan antara wilayah kabupaten dengan wilayah lain
3. Pemantapan kawasan lindung dilakukan melalui pemeliharaan, pemulihan dan pengkayaan
4. Pemantapan kawasan pertanian terpadu
5. Pengembangan kawasan pariwisata berbasis potensi alam dan karakteristik lokal
6. Pengembangan industri berbasis potensi lokal

7. Pengurangan kesenjangan wilayah terutama wilayah bagian selatan dan timur dengan wilayah bagian barat melalui optimalisasi konsep agropolitan berupa agroindustri, agrobisnis dan agrowisata sebagai penggerak pengembangan dan peningkatan nilai ekonomi kegiatan pertanian
8. Pengembangan dan pemantapan sistem prasarana energi, telematika atau telekomunikasi, sumber daya air dan penyehatan lingkungan sebagai prioritas pengembangan guna mendukung pengembangan ekonomi wilayah
9. Pengoptimalan kegiatan industri, pertanian dan pariwisata sebagai pendorong kegiatan ekonomi wilayah melalui penetapan kawasan-kawasan strategis yang mengakomodir kebutuhan ruang bagi ketiga kegiatan tersebut
10. Pengembangan kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan dalam pengembangan kegiatan wilayah baik dalam aspek fisik, sosial maupun ekonomi
11. Pengembangan dan penciptaan lapangan kerja yang berkaitan dengan sektor basis wilayah (INTANPARI) melalui peningkatan kegiatan industri, industri pengolahan hasil pertanian dan industri pariwisata
12. Peningkatan fungsi kawasan untuk Pertahanan dan Keamanan Negara

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten meliputi :

1. Rencana sistem perkotaan wilayah, terdiri atas :
 - a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan. PKL terdiri dari :
 - 1) Kecamatan Karanganyar
 - 2) Kecamatan Jaten
 - 3) Kecamatan Tawangmangu
 PKL mempunyai fungsi utama sebagai pusat pemerintahan kabupaten, pusat pendidikan, pusat pengembangan perdagangan dan jasa, dan pusat pengembangan kegiatan pariwisata.
 - b. Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) merupakan pusat kegiatan yang dipromosikan untuk kemudian hari ditetapkan sebagai PKL, hanya merupakan PPK dan harus ditetapkan sebagai kawasan strategis kabupaten dan mengindikasikan program pembangunannya di dalam arahan pemanfaatan ruangnya agar

pertumbuhannya dapat didorong untuk memenuhi kriteria PKL. PKLp berada di Kecamatan Colomadu. PKLp mempunyai fungsi utama sebagai pusat pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa.

c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. PPK terdiri dari :

- 1) Kecamatan Kebakkramat
- 2) Kecamatan Tasikmadu
- 3) Kecamatan Karangpandan
- 4) Kecamatan Kerjo
- 5) Kecamatan Jumapolo
- 6) Kecamatan Gondangrejo
- 7) Kecamatan Mojogedang
- 8) Kecamatan Matesih
- 9) Kecamatan Jumantono
- 10) Kecamatan Jatipuro
- 11) Kecamatan Jatiyoso
- 12) Kecamatan Ngargoyoso
- 13) Kecamatan Jenawi

PPK mempunyai fungsi utama sebagai pusat pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa, pusat pengembangan kegiatan industri, pusat pengembangan kegiatan pertanian dan pusat pengembangan kegiatan pariwisata.

d. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. PPL terdiri dari :

- 1) Desa Kaliboto Kecamatan Mojogedang
- 2) Desa Malangaten Kecamatan Kebakkramat
- 3) Desa Ngadiluwih Kecamatan Matesih
- 4) Desa Anggrasmanis Kecamatan Jenawi
- 5) Desa Jatirejo Kecamatan Ngargoyoso
- 6) Desa Karang Sari Kecamatan Jatiyoso
- 7) Desa Wonorejo Kecamatan Jatiyoso
- 8) Desa Tugu Kecamatan Jumantono
- 9) Desa Lemahbang Kecamatan Jumapolo
- 10) Desa Jeruksawit Kecamatan Gondangrejo

PPL mempunyai fungsi utama sebagai pusat pengembangan kegiatan pertanian dan pusat pengembangan kegiatan pariwisata.

2. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah, terdiri atas :
 - a. Rencana sistem jaringan prasarana utama, berupa pengembangan sistem jaringan transportasi darat, yang meliputi :
 - 1) Jaringan jalan, meliputi : (a) jalan tol, (b) jaringan jalan arteri, (c) jaringan jalan kolektor, (d) jaringan jalan lokal, (e) rencana pengembangan terminal, (f) rencana pengembangan angkutan orang, dan (g) rencana pengembangan prasarana kelengkapan jalan.
 - 2) Jaringan jalan rel, meliputi : (a) pengembangan jalan rel ganda jalur Solo – Madiun, yang melewati Kecamatan Jaten dan Kecamatan Kebakkramat, (b) peningkatan fungsi stasiun Palur di Jaten, (c) peningkatan fungsi stasiun Kaliyoso di Gondangrejo, dan (d) pembangunan prasarana penunjang jalan rel *fly over* Palur.
 - b. Rencana sistem jaringan prasarana lainnya, yang meliputi :
 - 1) Rencana sistem jaringan energi, meliputi :
 - (a) peningkatan sarana pembangkit tenaga listrik
 - (b) pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik
 - 2) Rencana sistem jaringan telekomunikasi, meliputi :
 - (a) infrastruktur telekomunikasi yang berupa jaringan kabel telepon
 - (b) infrastruktur telepon nir kabel yang berupa menara telekomunikasi untuk mendukung penyediaan layanan telepon, pengiriman data, internet, penyiaran radio dan televisi
 - 3) Rencana sistem jaringan sumber daya air, yang meliputi :
 - (a) pengelolaan sungai
 - (b) prasarana jaringan irigasi
 - (c) jaringan air baku untuk air bersih
 - (d) sistem pengendalian banjir
 - 4) Rencana jaringan prasarana lingkungan, yang meliputi :
 - (a) rencana prasarana pengelolaan persampahan
 - (b) rencana pengembangan jaringan sumber air minum kota
 - (c) rencana prasarana pengelolaan limbah
 - (d) rencana jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi
 - (e) rencana pengembangan prasarana jaringan *drainase*

Rencana Pola Ruang Kabupaten, meliputi :

1. Kawasan lindung

Rencana pengembangan kawasan lindung meliputi :

- a. Kawasan hutan lindung, memiliki luas \pm 7.080 hektar, meliputi :
Kecamatan Tawangmangu, Kecamatan Ngargoyoso, Kecamatan Jenawi dan Kecamatan Jatiyoso.
- b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, berupa kawasan resapan air dengan luas \pm 7.061 hektar, meliputi : Kecamatan Tawangmangu, Kecamatan Matesih, Kecamatan Karangpandan, Kecamatan Ngargoyoso, Kecamatan Jatiyoso dan Kecamatan Jenawi.
- c. Kawasan perlindungan setempat, meliputi :
 - 1) Kawasan sekitar mata air, berupa kawasan dengan jarak 200 meter sekeliling mata air seluas \pm 598 hektar, terdapat di : Kecamatan Tawangmangu, Kecamatan Matesih, Kecamatan Karangpandan, Kecamatan Ngargoyoso, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Jumapolo, Kecamatan Jatipuro, Kecamatan Jatiyoso dan Kecamatan Jenawi.
 - 2) Kawasan sempadan sungai dan saluran irigasi, terdapat di seluruh kecamatan dengan luas \pm 17.936 hektar
 - 3) Kawasan sekitar waduk dan embung, berupa kawasan sepanjang perairan dengan jarak 50 meter dari titik pasang tertinggi dengan luas \pm 62 hektar, yang terdapat di :
 - (a) Waduk Delingan di Kecamatan Karanganyar
 - (b) Waduk Lalung di Kecamatan Karanganyar
 - (c) Waduk Jlantah di Kecamatan Jatiyoso
 - (d) Waduk Gondang di Kecamatan Kerjo
 - (e) Waduk Plalar di Kecamatan Kebakkramat
 - (f) Embung Jungke di Kecamatan Karanganyar
 - (g) Embung Dungdo di Kecamatan Matesih
 - (h) Embung Alastuwo di Kecamatan Kebakkramat
 - (i) Embung Kricikan di Kecamatan Gondangrejo
 - (j) Embung-embung lainnya di setiap kecamatan
 - 4) Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan, terdapat di tiap ibukota kecamatan dan kawasan perkotaan dengan luas \pm 3.528 hektar yang ditetapkan dengan proporsi 40% dari luas kawasan perkotaan, yang meliputi :
 - (a) RTH publik yaitu taman kota, taman pemakaman umum, jalur hijau sepanjang jalan dan sungai dengan proporsi paling sedikit 25%

- (b) RTH privat yaitu kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan dengan proporsi 15%
- d. Kawasan pelestarian alam dan cagar budaya, meliputi :
- 1) Kawasan pelestarian alam, meliputi :
 - (a) Taman Wisata Alam, yaitu Taman Wisata Alam Grojogan Sewu dengan luas \pm 64 hektar yang terdapat di Desa Kalisoro dan Desa Tawangmangu, Kecamatan Tawangmangu.
 - (b) Taman Hutan Raya, yaitu Taman Hutan Raya K.G.P.A.A Mangkunegoro I di Ngargoyoso dengan luas \pm 231 hektar yang terdapat di Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso.
 - 2) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, meliputi :
 - (a) Kawasan candi, meliputi :
 - Candi Sukuh di Kecamatan Ngargoyoso
 - Candi Cetho di Kecamatan Jenawi
 - (b) Kawasan situs, meliputi :
 - Situs Ngasinan/Watukandang di Kecamatan Matesih
 - Situs Sangiran di Kecamatan Gondangrejo
 - Situs Palangatan di Kecamatan Ngargoyoso
 - Situs Prasejarah Dayu di Kecamatan Gondangrejo
 - Situs Menggung di Kecamatan Tawangmangu
 - (c) Kawasan bangunan kuno, meliputi :
 - Masjid Karanganyar di Kecamatan Karanganyar
 - Masjid Jami' di Kecamatan Tasikmadu
 - Pabrik Gula Tasikmadu di Kecamatan Tasikmadu
 - Pabrik Gula Colomadu di Kecamatan Colomadu
 - Makam Raja-Raja Surakarta di Kecamatan Matesih
 - Gapura Papahan di Kecamatan Tasikmadu
- e. Kawasan rawan bencana alam, meliputi :
- 1) Kawasan rawan bencana longsor, terbagi menjadi :
 - (a) Kawasan bencana tanah longsor menengah, meliputi : Kecamatan Jenawi, Kecamatan Ngargoyoso, Kecamatan Tawangmangu, Kecamatan Jatiyoso, Kecamatan Jumapolo, Kecamatan Jumantono, Kecamatan Jatipuro, Kecamatan Karangpandan, Kecamatan Matesih, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Kerjo, Kecamatan Kebakkramat,

Kecamatan, Kecamatan Gondangrejo dan Kecamatan Mojogedang.

(b) Kawasan rawan bencana tanah longsor tinggi, meliputi : Kecamatan Ngargoyoso, Kecamatan Tawangmangu, Kecamatan Jatiyoso, Kecamatan Matesih, Kecamatan Jenawi dan Kecamatan Kerjo.

2) Kawasan rawan bencana banjir, meliputi Kecamatan Jaten, Kecamatan Kebakkramat dan Kecamatan Gondangrejo.

3) Kawasan rawan puting beliung, meliputi : Kecamatan Mojogedang, Kecamatan Tasikmadu, Kecamatan Ngargoyoso, Kecamatan Jumapolo, Kecamatan Gondangrejo dan Kecamatan Kebakkramat.

f. Kawasan lindung arkeologi, meliputi :

1) Kawasan cagar alam arkeologi, meliputi :

(a) Situs Ngasinan/Watukandang di Kecamatan Matesih

(b) Situs Sangiran di Kecamatan Gondangrejo

(c) Situs Palanggatan di Kecamatan Ngargoyoso

(d) Situs Prasejarah Dayu di Kecamatan Gondangrejo

(e) Situs Menggung di Kecamatan Tawangmangu

2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah, merupakan kawasan resapan/imbuhan air tanah pada Cekungan Air Tanah Karanganyar-Boyolali, yang terletak di Kecamatan Tawangmangu, Kecamatan Jenawi, Kecamatan Ngargoyoso, Kecamatan Jatiyoso, Kecamatan Kerjo, Kecamatan Karangpandan, Kecamatan Matesih, Kecamatan Jatipuro, Kecamatan Jumapolo, Kecamatan Jumantono, Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Mojogedang.

g. Kawasan lindung lainnya, berupa kawasan perlindungan *plasma nutfah* dan kawasan lindung yang dikelola masyarakat. Kawasan lindung *plasma nutfah* terdapat di Kecamatan Tawangmangu, Kecamatan Karangpandan dan Kecamatan Ngargoyoso. Sedangkan, kawasan lindung yang dikelola masyarakat mempunyai luas \pm 12.105 hektar, yang terdapat di Kecamatan Jenawi, Kecamatan Ngargoyoso, Kecamatan Tawangmangu, Kecamatan Jatiyoso dan Kecamatan Matesih.

2. Kawasan budidaya, meliputi :

a. Kawasan peruntukan hutan produksi, merupakan hutan produksi tetap dengan luas \pm 259 hektar meliputi : Kecamatan Karanganyar,

Kecamatan Matesih, Kecamatan Mojogedang dan Kecamatan Jatipuro.

- b. Kawasan peruntukan hutan rakyat, merupakan kawasan yang diarahkan untuk menunjang fungsi lindung, sosial dan ekonomi dengan luas \pm 12.267 hektar, yang terdapat di seluruh kecamatan.
- c. Kawasan peruntukan pertanian, meliputi :
 - 1) Kawasan pertanian tanaman pangan, terbagi menjadi :
 - (a) Pertanian lahan basah, dengan luas \pm 22.477 hektar untuk komoditas padi dan palawija. Kawasan ini tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Karanganyar.
 - (b) Pertanian lahan kering, dengan luas \pm 12.927 hektar untuk komoditas padi gogo, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai dan tanaman palawija. Kawasan ini tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Karanganyar.
 - 2) Kawasan hortikultura, tersebar di seluruh kecamatan dengan komoditas sayur, buah, tanaman *biofarmaka* dan tanaman hias.
 - 3) Kawasan perkebunan, dengan luas \pm 6.351 hektar untuk komoditas cengkeh, tebu, mete, kopi, kelapa, kapuk, lada, tembakau dan vanili. Kawasan ini tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Karanganyar.
 - 4) Kawasan peternakan, terbagi menjadi :
 - (a) Peternakan unggas, terletak di :
 - Desa Wonosari, Desa Jeruksawit, Desa Karangturi, Desa Plesungan, Desa Rejosari dan Desa Kragan Kecamatan Gondangrejo
 - Desa Kaliboto, Desa Kedung Jeruk dan Desa Sewurejo Kecamatan Mojogedang
 - Desa Tugu, Desa Blorong, Desa Ngunut, Desa Sambirejo, Desa Sedayu, Desa Sukosari, Desa Gemantar, Desa Tunggulrejo, Desa Genengan, Desa Sringin dan Desa Kebak Kecamatan Juantono
 - Desa Kwangsan, Desa Bakalan, Desa Kedawung, Desa Jatirejo, Desa Jumapolo, Desa Giriwondo, Desa Ploso, Desa Lemahbang, Desa Karangbangun dan Desa Paseban Kecamatan Jumapolo
 - Desa Tlobo, Desa Jatiyoso, Desa Wukursawit dan Desa Karang Sari Kecamatan Jatiyoso
 - Desa Jatiroyo, Desa Jatipurwo, Desa Jatiwarno dan Desa Jatisobo Kecamatan Jatipuro

- Desa Tamansari, Desa Gempolan dan Desa Plosorejo Kecamatan Kerjo
- Desa Kaliwuluh, Desa Pulosari dan Desa Banjarharjo Kecamatan Kebakkramat
- Kelurahan Gedong dan Kelurahan Delingan Kecamatan Karanganyar
- Desa Sidomukti, Desa Lempong dan Desa Trengguli Kecamatan Jenawi

(b) Peternakan sapi, terletak di :

- Kelurahan Gedong, Kelurahan Jungke, Kelurahan Bolong, Kelurahan Delingan, Kelurahan Lalung, Kelurahan Tegalgede, Kelurahan Gayamdompo dan Kelurahan Tegalgede Kecamatan Karanganyar
- Desa Jatikuwung, Desa Jatiroyo, Desa Jatipurwo, Desa Jatiwarno dan Desa Jatisobo Kecamatan Jatipuro
- Desa Kaliboto, Desa Sewurejo dan Desa Kedungjeruk Kecamatan Mojogedang
- Desa Buran, Desa Suruh, Desa Wonolopo, Desa Kalijirak, Desa Kaling, Desa Karangmojo dan Desa Pandeyan Kecamatan Tasikmadu
- Desa Tugu, Desa Blorong, Desa Ngunut, Desa Sambirejo dan Desa Sedayu Kecamatan Jumantono
- Semua desa di Kecamatan Jumapolo
- Desa Ngargoyoso Kecamatan Ngargoyoso
- Desa Tohkuning dan Desa Dopleng Kecamatan Karangpandan
- Desa Sidomukti, Desa Lempong dan Desa Trengguli Kecamatan Jenawi
- Desa Wonorejo, Desa Wonokeling dan Desa Jeruk Kecamatan Jatiyoso
- Desa Banjarharjo, Desa Kaliwuluh dan Desa Pulosari Kecamatan Kebakkramat
- Desa Pablengan, Desa Karangbangun, Desa Girilayu dan Desa Plosorejo Kecamatan Matesih
- Desa Wonosari, Desa Rejosari, Desa Kragan dan Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo

(c) Peternakan domba/kambing, terletak di :

- Desa Tugu, Desa Blorong, Desa Ngunut, Desa Sambirejo dan Desa Sedayu Kecamatan Jumantono
- Desa Kwangsan, Desa Bakalan, Desa Kedawung, Desa Jatirejo, Desa Jumapolo, Desa Giriwondo, Desa Kadipiro, Desa Ploso, Desa Lemahbang, Desa Karangbangun dan Desa Paseban Kecamatan Jumapolo
- Desa Kaliboto, Desa Sewurejo dan Desa Kedungjeruk Kecamatan Mojogedang
- Desa Ngargoyoso Kecamatan Ngargoyoso
- Desa Tohkuning Kecamatan Karangpandan
- Desa Sidomukti, Desa Lempong dan Desa Trengguli Kecamatan Jenawi
- Desa Tlobo, Desa Jatiyoso, Desa Wukirsawit dan Desa Karangsari Kecamatan Jatiyoso
- Desa Banjarharjo, Desa Kaliwuluh dan Desa Pulosari Kecamatan Kebakkramat
- Desa Jeruksawit Kecamatan Gondangrejo

(d) Peternakan babi, terletak di :

- Desa Tugu, Desa Ngunut, Desa Blorong dan Desa Sambirejo Kecamatan Jumantono
- Desa Sroyo Kecamatan Jaten
- Desa Plesungan, Desa Jeruksawit, Desa Karangturi, Desa Wonosari dan Desa Rejosari Kecamatan Gondangrejo
- Desa Kemiri dan Desa Kebak Kecamatan Kebakkramat

d. Kawasan peruntukan perikanan, terdiri dari :

1) Kawasan peruntukan perikanan tangkap, meliputi :

- a) Sungai, seluruh perairan badan sungai di wilayah kabupaten
- b) Bendungan/danau/embung yang terdapat di seluruh kecamatan

2) Kawasan peruntukan budidaya perikanan, meliputi :

- a) Kolam, tersebar di seluruh kecamatan
- b) Sungai, dengan luas \pm 250 hektar yang terdapat di seluruh kecamatan
- c) Bendungan/embung yang terdapat di seluruh kecamatan

e. Kawasan peruntukan pertambangan, terbagi atas :

1) Kawasan pertambangan mineral, meliputi :

- a) Trass, terletak di Kecamatan Matesih, Kecamatan Tawangmangu dan Kecamatan Jatiyoso
 - b) Batu gamping, terletak di Kecamatan Tawangmangu dan Kecamatan Jenawi
 - c) Kaolin, terletak di Kecamatan Matesih, Kecamatan Jumapolo, Kecamatan Ngargoyoso dan Kecamatan Jenawi
 - d) Andesit, terletak di Kecamatan Jenawi, Kecamatan Ngargoyoso dan Kecamatan Tawangmangu
 - e) Tanah urug, terletak di Kecamatan Jumantono, Kecamatan Jumapolo, Kecamatan Jatiyoso, Kecamatan Jatipuro, Kecamatan Kebakkramat, Kecamatan Gondangrejo dan Kecamatan Ngargoyoso
 - f) Tanah liat, terletak di Kecamatan Matesih, Kecamatan Mojogedang, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Tasikmadu, Kecamatan Jaten, Kecamatan Gondangrejo, Kecamatan Kebakkramat, Kecamatan Kerjo, Kecamatan Karangpandan dan Kecamatan Colomadu
 - g) Sirtu, terletak di Kecamatan Matesih, Kecamatan Kerjo dan Kecamatan Jumapolo
 - h) Andesit pasir, terletak di Kecamatan Ngargoyoso, Kecamatan Jatiyoso, Kecamatan Jenawi dan Kecamatan Tawangmangu
- 2) Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi, terletak di Kecamatan Gondangrejo, Kecamatan Colomadu, Kecamatan Jaten, Kecamatan Kebakkramat, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Mojogedang, Kecamatan Tasikmadu, Kecamatan Jumantono, Kecamatan Jumapolo, Kecamatan Jatipuro, Kecamatan Jatiyoso, Kecamatan Matesih, Kecamatan Karangpandan, Kecamatan Kerjo, Kecamatan Jenawi dan Kecamatan Ngargoyoso
- 3) Kawasan pertambangan panas bumi, terletak di Kecamatan Tawangmangu, Kecamatan Jatiyoso, Kecamatan Ngargoyoso, Kecamatan Jenawi, Kecamatan Matesih, Kecamatan Kerjo dan Kecamatan Karangpandan
- f. Kawasan peruntukan industri, meliputi :
- 1) Industri besar, terletak di :
 - a) Desa Karangturi, Desa Plesungan, Desa Wonorejo, Desa Selokaton, Desa Bulurejo dan Desa Tuban Kecamatan Gondangrejo

- b) Desa Kaliwuluh, Desa Kemiri, Desa Pulosari dan Desa Macanan Kecamatan Kebakkramat
 - c) Desa Sroyo, Desa Ngringo, Desa Jaten, Desa Jetis, Desa Dagen dan Desa Brujul Kecamatan Jaten
 - d) Desa Kaling dan Desa Buran Kecamatan Tasikmadu
- 2) Industri menengah, terletak di :
- a) Desa Karangturi, Desa Plesungan, Desa Wonorejo, Desa Selokaton, Desa Bulurejo dan Desa Tuban Kecamatan Gondangrejo
 - b) Desa Kaliwuluh, Desa Kemiri, Desa Pulosari dan Desa Macanan Kecamatan Kebakkramat
 - c) Desa Sroyo, Desa Ngringo, Desa Jaten, Desa Jetis, Desa Dagen dan Desa Brujul Kecamatan Jaten
 - d) Desa Kaling dan Desa Buran Kecamatan Tasikmadu
 - e) Desa Kedungjeruk Kecamatan Mojogedang
 - f) Desa Sukosari, Desa Tugu dan Desa Sedayu Kecamatan Jumantono
 - g) Desa Karangbangun dan Desa Kwangsan Kecamatan Jumapolo
 - h) Desa Jatisuko dan Desa Jatisobo Kecamatan Jatipuro
- 3) Industri kecil dan mikro, yang tersebar di semua kecamatan
- g. Kawasan peruntukan pariwisata, terbagi menjadi :
- 1) Pengembangan wisata alam, meliputi :
- a) Puncak Lawu di Gondosuli, Tawangmangu
 - b) Pringgondani di Blumbang, Tawangmangu
 - c) Sekipan di Kalisoro, Tawangmangu
 - d) Wisata hutan Bromo di Delingan, Karanganyar
 - e) Grojogan Sewu di Kalisoro, Tawangmangu
 - f) Taman Hutan Rakyat (Tahura) di Ngargoyoso
 - g) Monumen Tanah Kritis di Jumantono
 - h) Sendang Kuning di Karangpandan
 - i) Air Terjun Temanten di Gumeng, Jenawi
 - j) Tlogo Madirdo di Ngargoyoso
 - k) Air Terjun Jumok di Ngargoyoso
 - l) Air Terjun Parang Ijo di Ngargoyoso
 - m) Wisata Kebuh Teh di Kemuning, Ngargoyoso
 - n) Sendang Lanang-Wadon di Kemuning, Ngargoyoso
 - o) Sumber Air Panas Saptatirta Pablengan di Matesih
 - p) Sumber Air Panas Balong di Jenawi

- q) Sumber Air Panas Cumpleng, Plumbon di Tawangmangu
 - r) Goa Cokrokembang di Anggrasmanis, Jenawi
 - s) Goa Kendalisodo di Anggrasmanis, Jenawi
 - t) Goa Tlorong di Lempong, Jenawi
- 2) Pengembangan wisata budaya, meliputi :
- a) Situs Watukandang di Karangbangun, Matesih
 - b) Penggalian fosil di Dayu, Gondangrejo
 - c) Candi Sukung di Berjo, Ngargoyoso
 - d) Candi Cetho di Gumeng, Jenawi
 - e) Candi Menggung Bener di Tawangmangu
 - f) Candi Palanggatan di Ngargoyoso
 - g) Astana Mangadeg di Girilayu, Matesih
 - h) Astana Girilayu di Girilayu, Matesih
 - i) Astana Giribangun di Karangbangun, Matesih
 - j) Astana Derpoyudan di Kwadungan, Kerjo
 - k) Astana Temuireng di Tegalgede, Karanganyar
 - l) Astana Randusongo di Gaum, Tasikmadu
 - m) Krendowahono di Krendowahono, Gondangrejo
 - n) Bulakkragan di Kragan, Gondangrejo
 - o) Jabal Kanil di Bandardawung, Tawangmangu
 - p) Padepokan Gedong Putih dan Lemah Putih di Gondangrejo
 - q) Pringgondani di Tawangmangu
 - r) Makam Notonegoro di Palur, Jaten
 - s) Makam Nyi Karang di Karanganyar
 - t) Pure Pamacekan di Karangpandan
- 3) Pengembangan wisata buatan/binaan manusia, meliputi :
- a) Situ Lalung di Lalung, Karanganyar
 - b) Situ Delingan di Delingan, Karanganyar
 - c) Embung Plalar di Kebakkramat
 - d) Taman Rekreasi Balekembang di Kalisoro, Tawangmangu
 - e) Taman Rekreasi Camplung Lawu Resort di Tawangmangu
 - f) Kolam Renang Intan Pari di Ngijo, Tasikmadu
 - g) Kolam Renang Permata di Lalung, Karanganyar
 - h) Agromina Botok, Gempolan, Gaten (Kerjo)
 - i) Agrowisata Tanaman Buah Dayu, Gondangrejo
 - j) Wisata Air Dam Kricikan Rejosari, Gondangrejo
 - k) Agrowisata Pendem, Mojogedang
 - l) Agrowisata Sondokoro, Tasikmadu

- m) Desa Wisata di Kecamatan Tawangmangu, Kecamatan Ngargoyoso, Kecamatan Jenawi, Kecamatan Kerjo, Kecamatan Karangpandan, Kecamatan Matesih, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Tasikmadu dan Kecamatan Gondangrejo
 - n) Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) Delingan Karanganyar
- h. Kawasan peruntukan permukiman, tersebar di seluruh kecamatan seluas \pm 26.632 hektar, meliputi :
- 1) Pengembangan kawasan permukiman perkotaan seluas \pm 8.821 hektar
 - 2) Pengembangan kawasan permukiman perdesaan seluas \pm 17.811 hektar
- i. Kawasan peruntukan budidaya lainnya, terdiri atas :
- 1) Kawasan pertahanan dan keamanan, meliputi :
 - a) KODIM di Kecamatan Karanganyar
 - b) POLRES di Kecamatan Karanganyar
 - c) BRIMOB di Kecamatan Karanganyar
 - d) KORAMIL di seluruh kecamatan
 - e) POLSEK di seluruh kecamatan
 - 2) Kawasan bumi perkemahan, terletak di Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Ngargoyoso dan Kecamatan Tawangmangu
 - 3) Kawasan fasilitas sosial dan fasilitas umum, meliputi :
 - a) Pembangunan kawasan olahraga (GOR) di Kecamatan Karanganyar
 - b) Penyediaan fasilitas kesehatan (Rumah Sakit (RS), Puskesmas, Puskesmas Pembantu (PUSTU), Rumah Bersalin/Balai Kesehatan Ibu dan Anak (RB/BKIA), Balai Pengobatan, Apotek) yang tersebar di seluruh kecamatan

Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dengan memperhatikan Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP). Kawasan Strategis Provinsi (KSP) meliputi :

- 1. KSP Kawasan Perkotaan Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten (SUBOSUKAWONOSRATEN)
- 2. KSP Kawasan Candi Cetho dan Candi Sukuh
- 3. KSP Kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo
- 4. KSP Kawasan Gunung Lawu

Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) meliputi :

1. KSK bidang pertumbuhan ekonomi, meliputi :
 - a) Kawasan yang berpotensi menjadi kegiatan perekonomian tinggi, meliputi :
 - 1) Kawasan Strategis Kota Colomadu
 - 2) Kawasan Strategis Kota Jaten
 - 3) Kawasan Strategis Kota Karanganyar
 - 4) Kawasan Strategis Kota Tawangmangu
 - b) Kawasan yang berfungsi sebagai ketahanan pangan/pertanian basah, meliputi :
 - 1) Kawasan Strategis Agropolitan Sukuh, Cetho, Tawangmangu, Karangpandan dan Matesih (Suthomadansih)
 - 2) Kawasan Strategis Agropolitan di Mojogedang
 - 3) Kawasan Strategis Agropolitan di Jumapolo
2. KSK bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi :
 - a) Kawasan Sub DAS Kedawung Hulu
 - b) Kawasan Sub DAS Jlantah Walikan
 - c) Kawasan Sub DAS Samin
 - d) Kawasan Sub DAS Mungkung
 - e) Kawasan Sub DAS Kenatan
 - f) Kawasan Sub DAS Pepe
3. KSK bidang sosial budaya, meliputi :
 - a) Kawasan Situs Sangiran di Gondangrejo
 - b) Kawasan Makam Raja Jawa di Matesih

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAPPEDA sebagai SKPD yang mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah, memiliki peran yang sangat penting di dalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan, oleh karenanya analisis isu strategis tersebut merupakan langkah awal di dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan evaluasi pembangunan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah serta hasil identifikasi permasalahan tahun-tahun sebelumnya, maka isu strategis di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu 2013 – 2018, sebagai berikut :

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan. Posisi politik pemerintah (eksekutif) saat

ini yang “kalah” jika dibandingkan dengan lembaga legislatif. Posisi demikian sering mengacaukan hasil perencanaan pembangunan.

2. Belum mantapnya mekanisme perencanaan antara BAPPEDA dengan SKPD dan antar SKPD. Hal ini disebabkan belum adanya kesepahaman pengertian dan teknis penyusunan rencana di hamper semua SKPD.
3. Mengendurnya semangat masyarakat terlibat dalam proses perencanaan pembangunan akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikan rencana.
4. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku nerabas (*shortcutting*).
5. Pada internal birokrasi, adanya lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar SKPD, rendahnya kapasitas dan komitmen SKPD pada proses perencanaan, rendahnya kapasitas fiskal pemerintah daerah yang berakibat pada lebarnya celah fiskal (*fiscal gap*).
6. Pada internal BAPPEDA, belum mampu menyediakan alat-alat praktis analisis kelayakan kegiatan yang kredibel, belum meratanya kapasitas analitik sumber daya manusia perencana, belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian perencanaan pembangunan daerah.
7. Pengaruh dan dampak globalisasi yang sering sulit diprediksi

Dalam kurun waktu lima tahun ke depan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, BAPPEDA diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan sampai tingkat desa, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan. Untuk mewujudkan hal tersebut, kondisi yang harus dipersiapkan antara lain sebagai berikut :

1. Perlu adanya sikap yang arif dan cerdas agar pelaksanaan perencanaan pembangunan sesuai dengan dinamika peraturan perundangan yang berlaku

2. Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan berjalan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan
3. Perlu adanya panduan terhadap sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah
5. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran
6. Meningkatnya kapasitas kelembagaan di tingkat basis dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas proses perencanaan
7. Meningkatnya kualitas SDM perencana terhadap penguasaan keahlian (*skill*) fungsional perencanaan yang sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
8. Optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang sistematis dan akurat, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan
9. Tersedianya ketatalaksanaan perencanaan pembangunan

3.5.1 Analisis Lingkungan Strategis

Berdasarkan hasil penelaahan isu-isu strategis, maka analisis lingkungan strategis baik internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman) selanjutnya digunakan untuk penentuan strategi ke dalam pola analisis SWOT, sebagai berikut :

1. Analisis lingkungan internal

Tabel 3.1
Analisis Lingkungan Internal BAPPEDA Kabupaten Karanganyar

No	Kekuatan (<i>Strengths</i>)	No	Kelemahan (<i>Weaknes</i>)
1.	Sarana dan prasarana kerja yang memadai	1.	Kuantitas SDM pegawai belum memadai
2.	Pembagian tugas jelas sesuai tupoksi	2.	Belum optimalnya kualitas SDM pegawai
3.	Fungsi BAPPEDA sangat strategis dalam perencanaan pembangunan daerah	3.	Manajemen data dan informasi masih belum optimal
4.	Kemampuan menggalang partisipasi pemangku kepentingan dalam proses	4.	Sistem monitoring dan evaluasi belum optimal

	perencanaan pembangunan cukup memadai		
5.	Akses terhadap informasi pembangunan cukup tinggi		

2. Analisis lingkungan eksternal

Tabel 3.2

Analisis Lingkungan Eksternal BAPPEDA Kabupaten Karanganyar

No	Peluang (<i>Opportunities</i>)	No	Ancaman (<i>Threats</i>)
1.	Adanya regulasi yang mengatur peran BAPPEDA di daerah	1.	Partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap perencanaan belum optimal
2.	Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan cukup tinggi	2.	Tuntutan dan aspirasi masyarakat semakin meningkat dan beragam
3.	Koordinasi antar instansi terkait cukup tinggi	3.	SKPD masih kurang memahami mekanisme perencanaan pembangunan daerah
4.	Meningkatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	4.	Intervensi politik terhadap perencanaan pembangunan daerah yang masih sangat kuat
5.	Adanya Perda tentang perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RTRW)		

3.5.2 Pilihan Strategi

Berdasarkan hasil analisa lingkungan yang telah dilakukan, berikut ini adalah pilihan-pilihan strategis yang dapat diambil guna menentukan kebijakan-kebijakan sebagai bentuk antisipasi masa yang akan datang serta untuk perbaikan kondisi saat ini. Strategi ini disusun dengan memadukan antara Kekuatan dengan Peluang, Kelemahan dengan Peluang, Kekuatan dengan Ancaman serta Kelemahan dengan Ancaman melalui metode analisis SWOT.

1. Strategi SO (Kekuatan – Peluang), yaitu menggunkan kekuatan untuk mendapatkan peluang.
 - a. Mengoptimalkan fungsi BAPPEDA yang sangat strategis untuk memperkuat perencanaan pembangunan daerah

- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah
 - c. Meningkatkan koordinasi antar instansi untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah
 - d. Meningkatkan pemanfaatan teknologi, ilmu pengetahuan dan informasi dalam perencanaan pembangunan daerah
 - e. Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan daerah dengan peran BAPPEDA yang cukup strategis
2. Strategi WO (Kelemahan – Peluang), yaitu mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang
 - a. Memanfaatkan regulasi yang mengatur peran BAPPEDA di daerah untuk mengoptimalkan koordinasi BAPPEDA dan SKPD
 - b. Meningkatkan kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan kompetensi pegawai
 - c. Meningkatkan kualitas data melalui pemanfaatan teknologi, ilmu pengetahuan dan informasi
 - d. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi melalui koordinasi antar instansi
 3. Strategi ST (Kekuatan – Ancaman), yaitu menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman
 - a. Mengoptimalkan fungsi BAPPEDA yang sangat strategis untuk menghadapi intervensi politis, menyelaraskan keterpaduan program antar SKPD, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan
 - b. Mengoptimalkan kemampuan SDM untuk memenuhi tuntutan dan aspirasi masyarakat
 - c. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang dimiliki untuk mengatasi kuantitas dan kualitas SDM pegawai yang masih belum optimal
 - d. Mengoptimalkan akses informasi pembangunan dalam menyikapi peraturan perundangan yang tidak selaras
 4. Strategi WT (Kelemahan – Ancaman), yaitu meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman
 - a. Mendayagunakan kemampuan pegawai untuk mengantisipasi keragaman tuntutan dan aspirasi masyarakat
 - b. Mengoptimalkan kualitas data dan informasi untuk pemanfaatan produk-produk perencanaan

Tabel 3.3
Analisis SWOT dalam Penentuan Strategi

<p align="center">Analisis Lingkungan Internal</p>	<p><u>KEKUATAN (STRENGTHS)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan prasarana kerja yang memadai 2. Pembagian tugas jelas sesuai tupoksi 3. Fungsi BAPPEDA sangat strategis dalam perencanaan pembangunan daerah 4. Kemampuan menggalang partisipasi pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan cukup memadai 5. Akses terhadap informasi pembangunan cukup tinggi 	<p><u>KELEMAHAN (WEAKNES)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kuantitas SDM pegawai belum memadai 2. Belum optimalnya kualitas SDM pegawai 3. Manajemen data dan informasi masih belum optimal 4. Sistem monitoring dan evaluasi belum optimal
<p>Analisis Lingkungan Eksternal</p> <p><u>PELUANG (OPPORTUNITIES)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya regulasi yang mengatur peran BAPPEDA di daerah 2. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan cukup tinggi 3. Koordinasi antar instansi terkait cukup tinggi 4. Meningkatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 5. Adanya Perda tentang perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RTRW) 	<p><u>Strategi SO (Kekuatan – Peluang)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan fungsi BAPPEDA yang sangat strategis untuk memperkuat perencanaan pembangunan daerah 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah 3. Meningkatkan koordinasi antar instansi untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah 4. Meningkatkan pemanfaatan teknologi, ilmu pengetahuan dan informasi dalam perencanaan pembangunan daerah 5. Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan daerah dengan peran BAPPEDA yang cukup strategis 	<p><u>Strategi WO (Kelemahan – Peluang)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan regulasi yang mengatur peran BAPPEDA di daerah untuk mengoptimalkan koordinasi BAPPEDA dan SKPD 2. Meningkatkan kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan kompetensi pegawai 3. Meningkatkan kualitas data melalui pemanfaatan teknologi, ilmu pengetahuan dan informasi 4. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi melalui koordinasi antar instansi

<p><u>ANCAMAN (THREATS)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap perencanaan belum optimal 2. Tuntutan dan aspirasi masyarakat semakin meningkat dan beragam 3. SKPD masih kurang memahami mekanisme perencanaan pembangunan daerah 4. Intervensi politik terhadap perencanaan pembangunan daerah yang masih sangat kuat 	<p>Strategi ST (Kekuatan – Ancaman)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan fungsi BAPPEDA yang sangat strategis untuk menghadapi intervensi politis, menyelaraskan keterpaduan program antar SKPD, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan 2. Mengoptimalkan kemampuan SDM untuk memenuhi tuntutan dan aspirasi masyarakat yang kian beragam 3. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang dimiliki untuk mengatasi kuantitas dan kualitas SDM pegawai yang masih belum optimal 4. Mengoptimalkan akses informasi pembangunan dalam menyikapi peraturan perundangan yang tidak selaras 	<p>Strategi WT (Kelemahan – Ancaman)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendayagunakan kemampuan pegawai untuk mengantisipasi keragaman tuntutan dan aspirasi masyarakat 2. Mengoptimalkan kualitas data dan informasi untuk pemanfaatan produk-produk perencanaan
---	---	--

3.5.3 Analisis Strategi Pilihan

Faktor penentu keberhasilan merupakan hasil kajian dari pilihan-pilihan strategi yang telah diuji dengan visi, misi dan nilai-nilai. Hasil kajian dari beberapa pilihan strategi menghasilkan Faktor Penentu Keberhasilan yang terdiri dari unsur internal dan eksternal, dimana kedua unsur tersebut saling mendukung dan tidak dapat berdiri sendiri.

Berdasarkan analisis SWOT sebelumnya maka terdapat 15 strategi pilihan atau Analisis Strategi Pilihan, sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan fungsi BAPPEDA yang sangat strategis untuk memperkuat perencanaan pembangunan daerah
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah
3. Meningkatkan koordinasi antar instansi untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah
4. Meningkatkan pemanfaatan teknologi, ilmu pengetahuan dan informasi dalam perencanaan pembangunan daerah
5. Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan daerah dengan peran BAPPEDA yang cukup strategis
6. Memanfaatkan regulasi yang mengatur peran BAPPEDA di daerah untuk mengoptimalkan koordinasi BAPPEDA dan SKPD
7. Meningkatkan kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan kompetensi pegawai
8. Meningkatkan kualitas data melalui pemanfaatan teknologi, ilmu pengetahuan dan informasi
9. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi melalui koordinasi antar instansi
10. Mengoptimalkan fungsi BAPPEDA yang sangat strategis untuk menghadapi intervensi politis, menyelaraskan keterpaduan program antar SKPD, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan
11. Mengoptimalkan kemampuan SDM untuk memenuhi tuntutan dan aspirasi masyarakat
12. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang dimiliki untuk mengatasi kuantitas dan kualitas SDM pegawai yang masih belum optimal
13. Mengoptimalkan akses informasi pembangunan dalam menyikapi peraturan perundangan yang tidak selaras

14. Mendayagunakan kemampuan pegawai untuk mengantisipasi keragaman tuntutan dan aspirasi masyarakat
15. Mengoptimalkan kualitas data dan informasi untuk pemanfaatan produk-produk perencanaan

3.5.4 Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan

Berdasarkan perumusan dan pembahasan pada analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal sebelumnya, maka dapat ditentukan Faktor Penentu Keberhasilan, sebagai berikut :

- FPK I Mengoptimalkan kemampuan SDM perencana untuk memenuhi tuntutan dan aspirasi masyarakat yang kian beragam
- FPK II Meningkatkan kualitas data dan informasi melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam perencanaan pembangunan daerah
- FPK III Mengoptimalkan fungsi BAPPEDA yang sangat strategis untuk menghadapi intervensi politis, menyelaraskan keterpaduan program antar SKPD, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi BAPPEDA

4.1.1 Visi BAPPEDA

Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar, yaitu *“Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang selaras, terpadu, menyeluruh dan berkelanjutan dalam Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Daerah”*.

Yang dimaksud **Selaras** adalah : Perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan tujuan pembangunan nasional dan provinsi.

Yang dimaksud **Terpadu** adalah : Perencanaan Pembangunan Daerah yang mensinergikan semua bidang pembangunan.

Yang dimaksud **Menyeluruh** adalah : Perencanaan Pembangunan Daerah yang mencakup semua bidang pembangunan.

Yang dimaksud **Berkelanjutan** adalah : Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkesinambungan.

4.1.2 Misi BAPPEDA

Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya dijabarkan ke dalam misi yang akan menjadi tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan. Oleh karena itu, misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar dirumuskan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang sesuai dengan tujuan Pembangunan Nasional dan Provinsi.
2. Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang mensinergikan semua sektor pembangunan.
3. Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang melingkupi semua sektor pembangunan.

4. Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang berkesinambungan.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam waktu lima tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, serta menjadi arah kebijakan BAPPEDA Kabupaten Karanganyar. Untuk mewujudkan visi dan misi BAPPEDA, maka ditetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Karanganyar

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Misi I	Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang sesuai dengan tujuan Pembangunan Nasional dan Pembangunan Provinsi							
	Mewujudkan sinkronisasi perencanaan nasional dan provinsi	1. Terlaksananya program pembangunan nasional 2. Terlaksananya program pembangunan provinsi	1. Jumlah program nasional yang dilaksanakan 2. Jumlah program provinsi yang dilaksanakan	1	1	1	1	1
Misi II	Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang mensinergikan semua sektor pembangunan							
	Mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah	1. Terselenggaranya forum perencanaan interaktif dan penjangkaran aspirasi masyarakat 2. Ketersediaan fasilitas/prasarana informasi : a. Papan pengumuman b. Leaflet c. Pos Pengaduan d. Pengumuman di mass media / web site 3. Program/kegiatan Renja SKPD yang diakomodir dalam RKPD 4. Pelaksanaan program/kegiatan yang tepat waktu dan tepat sasaran 5. Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD 6. Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD 7. Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam	1. Frekuensi penyelenggaraan forum perencanaan interaktif dan penjangkaran aspirasi masyarakat 2. Fasilitas/prasarana informasi : a. Papan pengumuman b. Leaflet c. Pos Pengaduan d. Pengumuman di mass media / web site 3. Persentase program/kegiatan Renja SKPD yang diakomodir dalam RKPD 4. Persentase pelaksanaan program/kegiatan yang tepat waktu dan tepat sasaran 5. Persentase penjabaran program RPJMD ke RKPD 6. Persentase program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD 7. Persentase program RENJA RKPD yang diakomodir dalam DPA	3	3	3	3	3
				Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
				Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
				Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
				100%	100%	100%	100%	100%
				100%	100%	100%	100%	100%
				50%	50%	55%	55%	55%
				100%	100%	100%	100%	100%
				100%	100%	100%	100%	100%

		DPA SKPD	SKPD					
Misi III	Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang melingkupi semua sektor pembangunan							
	Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang mencakup semua bidang pembangunan	1. Tersedianya hasil kajian perencanaan pembangunan yang bersifat sektoral/ bidang 2. Tersedianya jenis data/informasi bidang pembangunan	1. Hasil kajian perencanaan pembangunan yang bersifat sektoral/ bidang (Ada/Tidak) 2. Data/informasi bidang pembangunan	Ada 3	Ada 3	Ada 3	Ada 3	Ada 3
Misi IV	Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang berkesinambungan							
	Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan	1. Tersedianya dokumen perencanaan sebagai acuan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan Perda/Perbup : a. RPJPD b. RPJMD c. RKPD d. RENSTRA SKPD e. RENJA SKPD f. KUA PPAS g. RTRW	1. Dokumen perencanaan sebagai acuan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan Perda/Perbup (Ada/Tidak) : a. RPJPD b. RPJMD c. RKPD d. RENSTRA SKPD e. RENJA SKPD f. KUA PPAS g. RTRW	Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada	Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada	Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada	Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada	Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

4.3 Strategi dan Kebijakan BAPPEDA

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah. Berikut ini adalah tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan BAPPEDA terkait dengan visi dan misi BAPPEDA :

Tabel 4.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi <i>Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang selaras, terpadu, menyeluruh dan berkelanjutan dalam Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Daerah</i>			
Misi I Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang sesuai dengan tujuan Pembangunan Nasional dan Provinsi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan sinkronisasi perencanaan nasional dan provinsi	1. Terlaksananya program pembangunan nasional	1. Mengoptimalkan fungsi BAPPEDA yang sangat strategis untuk memperkuat perencanaan pembangunan daerah	1. Peningkatan kualitas koordinasi perencanaan dan penyiapan bahan perencanaan, dokumen bidang penelitian, pengembangan dan statistik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya dan bidang fisik dan prasarana
	2. Terlaksananya program pembangunan provinsi	2. Meningkatkan koordinasi antar instansi untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	2. Peningkatan koordinasi antar instansi untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah sehingga tercipta perencanaan pembangunan daerah yang selaras dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan provinsi
		3. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi melalui koordinasi antar instansi	3. Peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi melalui koordinasi antar instansi
Misi II Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang mensinergikan semua sektor pembangunan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah	1. Terselenggaranya forum perencanaan interaktif dan penjangkaran aspirasi masyarakat	1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	1. Peningkatan peran serta dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
	2. Ketersediaan fasilitas/prasarana informasi : a. Papan pengumuman b. Leaflet c. Pos Pengaduan d. Pengumuman di mass media / web site	2. Memanfaatkan regulasi yang mengatur peran BAPPEDA di daerah untuk mengoptimalkan koordinasi BAPPEDA dengan SKPD	2. Peningkatan sinkronisasi Rencana Kerja SKPD dengan Rencana Kerja BAPPEDA
	3. Program/kegiatan		

	Renja SKPD yang diakomodir dalam RKPDP		
	4. Pelaksanaan program/kegiatan yang tepat waktu dan tepat sasaran		
	5. Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPDP		
	6. Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA SKPD		
	7. Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam DPA SKPD		
Misi III Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang melingkupi semua sektor pembangunan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang mencakup semua bidang pembangunan	1. Tersedianya hasil kajian perencanaan pembangunan yang bersifat sektoral/ bidang	1. Meningkatkan kualitas kajian sebagai bahan perencanaan pembangunan	1. Peningkatan kajian penelitian dan mengembangkan jaringan penelitian sebagai bahan masukan bagi perencanaan pembangunan daerah
	2. Tersedianya jenis data/informasi bidang pembangunan	2. Mengoptimalkan akses informasi pembangunan	2. Mengoptimalkan peran data base perencanaan bidang penelitian, pengembangan dan statistik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya dan bidang fisik prasarana dalam pengembangan data/informasi perencanaan pembangunan daerah
Misi IV Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang berkesinambungan.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan	1. Tersedianya dokumen perencanaan sebagai acuan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan Perda/Perbup : a. RPJPD b. RPJMD c. RKPDP d. RENSTRA SKPD e. RENJA SKPD f. KUA PPAS g. RTRW	1. Mengoptimalkan fungsi BAPPEDA yang sangat strategis untuk menghadapi intervensi politis, menyeleraskan keterpaduan program antar SKPD serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan	1. Peningkatan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan serta evaluasi terhadap dokumen pelaksanaan rencana pembangunan baik jangka pendek (RKPDP), jangka menengah (RPJMD) dan jangka panjang (RPJPD) sehingga dapat menjadi feedback bagi perencanaan pembangunan daerah selanjutnya

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Kode	Program	Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Keluaran	Target Kinerja Capaian Program (tahun)					SKPD Penunjang	Pagu Indikatif (tahun)				
				I	II	III	IV	V		I	II	III	IV	V
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)				
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Kegiatan Penyediaan Jasa surat menyurat												
	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur													
	3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur													
	4. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan													
	5. Program Pengembangan Data / Informasi													
	6. Program													

	Kerjasama Pembangunan														
	7. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar														
	8. Program Perencanaan Pembangunan Daerah														
	9. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi														
	10. Program Perencanaan Sosial Budaya														
	11. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam														

Keterangan:

- (1) diisi dengan kode program/kegiatan sesuai Permendagri 13/2006 dan perubahannya
- (2) diisi dengan judul program
- (3) diisi dengan judul kegiatan pokok/utama dari program ybs

- (4) diisi dengan tolok ukur kinerja yang dapat membantu menunjukkan macam keluaran/output program
- (5) diisi dengan target cakupan pelayanan/target keluaran program
- (6) diisi dengan SKPD lain yang bekerjasama dalam penanganan program ybs
- (7) diisi dengan perkiraan besar dana yang perlu dialokasikan untuk menjalankan program ybs

Catatan hasil konsultasi

- 1) Kewajaran dan kelayakan target kinerja capaian program
- 2) Kewajaran pagu indikatif (biaya satuan keluaran kegiatan)
- 3) Identifikasi strategi untuk mempertahankan pagu indikatif pada pembahasan anggaran
- 4) perbandingan total pagu indikatif tahun rencana dan tahun lalu guna menilai kewajaran tingkat kenaikan pagu

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Karanganyar

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
			Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Misi Pertama : Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang sesuai dengan tujuan Pembangunan Nasional dan Provinsi																	
Program Perencanaan Pembangunan Daerah																	
1.	Kegiatan Perencanaan Umum Pembangunan Daerah	Terlaksananya koordinasi perencanaan umum pembangunan selama 12 bulan	Rencana Umum Pembangunan Daerah	12 bulan	219.863.600	12 bulan	241.849.960	12 bulan	266.034.956	12 bulan	292.638.452	12 bulan	321.902.297	12 bulan	321.902.297	BAPPEDA Kab. Karanganyar	BAPPEDA Kab. Karanganyar
2.	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Tersusunnya data pelaksanaan program kegiatan pembangunan	Data Pelaksanaan program kegiatan pembangunan	100 buku	45.000.000	100 buku	49.500.000	100 buku	54.450.000	100 buku	59.895.000	100 buku	65.884.500	100 buku	65.884.500	BAPPEDA Kab. Karanganyar	BAPPEDA Kab. Karanganyar
3.	Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Dana APBN di Kabupaten Karanganyar	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan dana APBN di Kabupaten Karanganyar sebanyak 4 kali koordinasi		4 kali koordinasi	25.000.000	4 kali koordinasi	27.500.000	4 kali koordinasi	30.250.000	4 kali koordinasi	33.275.000	4 kali koordinasi	36.602.500	4 kali koordinasi	36.602.500	BAPPEDA Kab. Karanganyar	BAPPEDA Kab. Karanganyar

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
			Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Misi Kedua : Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang mensinergikan semua sektor pembangunan																	
Program Perencanaan Pembangunan Daerah																	
1.	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang dan Penyusunan Buku RKPDP	(a) Terselenggaranya MUSRENBANG desa, kecamatan dan kabupaten (b) Tersusunnya RKPDP Tahun Rencana (c) Tersusunnya RKPDP Perubahan Tahun Berjalan	Tersusunnya Buku RKPDP tahun rencana dan Buk RKPDP Perubahan Tahun Berjalan	(a) 177 desa, 17 kecamatan dan 1 kabupaten (b)70 buku RKPDP tahun rencana (c) 70 buku RKPDP Perubahan tahun berjalan	198.542.850	(a) 177 desa, 17 kecamatan dan 1 kabupaten (b)70 buku RKPDP tahun rencana (c) 70 buku RKPDP Perubahan tahun berjalan	218.397.135	(a) 177 desa, 17 kecamatan dan 1 kabupaten (b)70 buku RKPDP tahun rencana (c) 70 buku RKPDP Perubahan tahun berjalan	240.236.849	(a) 177 desa, 17 kecamatan dan 1 kabupaten (b)70 buku RKPDP tahun rencana (c) 70 buku RKPDP Perubahan tahun berjalan	264.260.533	(a) 177 desa, 17 kecamatan dan 1 kabupaten (b)70 buku RKPDP tahun rencana (c) 70 buku RKPDP Perubahan tahun berjalan	290.686.587	(a) 177 desa, 17 kecamatan dan 1 kabupaten (b)70 buku RKPDP tahun rencana (c) 70 buku RKPDP Perubahan tahun berjalan	290.686.587	BAPPEDA Kab. Karanganyar	BAPPEDA Kab. Karanganyar
2.	Kegiatan Penyusunan KUA dan PPAS APBD Perubahan Tahun Berjalan dan Penyusunan KUA dan PPAS APBD Tahun Rencana	Tersusunnya KUA PPAS Perubahan Tahun Berjalan dan KUA PPAS Tahun Rencana	KUA PPAS Perubahan Tahun Berjalan dan KUA PPAS Tahun Rencana	400 buku	137.427.950	400 buku	151.170.745	400 buku	166.287.820	400 buku	182.916.601	400 buku	201.208.262	400 buku	201.208.262	BAPPEDA Kab. Karanganyar	BAPPEDA Kab. Karanganyar
Program Pengembangan Data/Informasi																	
3.	Kegiatan Sosialisasi APBD	(a) Tersusunnya Buku Informasi APBD Tahun Anggaran berjalan, (b) Tersusunnya Poster Digital Informasi APBD Tahun Anggaran Berjalan	Tersusunnya Buku Informasi dan Poster Digital Informasi APBD Tahun Anggaran berjalan	(a) 300 buku (b) 4 set Poster Digital	53.455.000	(a) 300 buku (b) 4 set Poster Digital	58.800.500	(a) 300 buku (b) 4 set Poster Digital	64.680.550	(a) 300 buku (b) 4 set Poster Digital	71.148.605	(a) 300 buku (b) 4 set Poster Digital	78.263.466	(a) 300 buku (b) 4 set Poster Digital	78.263.466	BAPPEDA Kab. Karanganyar	BAPPEDA Kab. Karanganyar

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
			Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Misi Ketiga : Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang melingkupi semua sektor pembangunan																	
Program Kerjasama Pembangunan																	
1.	Kegiatan Koordinasi KELITBANGAN	(a) Terlaksananya koordinasi penelitian, (b) Terlaksananya iuran/kontribusi Jarlitbang	(a) Terlaksananya koordinasi penelitian, (b) Terlaksananya iuran/kontribusi Jarlitbang	10 kali koordinasi dan 1 lembaga	50.000.000	10 kali koordinasi dan 1 lembaga	55.000.000	10 kali koordinasi dan 1 lembaga	60.500.000	10 kali koordinasi dan 1 lembaga	66.550.000	10 kali koordinasi dan 1 lembaga	73.205.000	10 kali koordinasi dan 1 lembaga	73.205.000	BAPPEDA Kab. Karanganyar	BAPPEDA Kab. Karanganyar
2.	Kegiatan KRENOVA	(a) Terlaksananya lomba KRENOVA dan mengikuti pameran KRENOVA sebanyak 1 kali pameran untuk tiap tahunnya, (b) Tersedianya hadiah perlombaan untuk 3 pemenang	(a) Terlaksananya lomba KRENOVA dan mengikuti pameran KRENOVA sebanyak 1 kali pameran untuk tiap tahunnya, (b) Tersedianya hadiah perlombaan untuk 3 pemenang	1 kali pameran dan 3 pemenang	80.000.000	1 kali pameran dan 3 pemenang	88.000.000	1 kali pameran dan 3 pemenang	96.800.000	1 kali pameran dan 3 pemenang	106.480.000	1 kali pameran dan 3 pemenang	117.128.000	1 kali pameran dan 3 pemenang	117.128.000	BAPPEDA Kab. Karanganyar	BAPPEDA Kab. Karanganyar
Program Pengembangan Data/Informasi																	
3.	Kegiatan Penyusunan Buku Potensi Daerah	Tersusunnya Buku Potensi Daerah	Data Potensi Daerah	100 buku	15.000.000	100 buku	16.500.000	100 buku	18.150.000	100 buku	19.965.000	100 buku	21.961.500	100 buku	21.961.500	BAPPEDA Kab. Karanganyar	BAPPEDA Kab. Karanganyar
4.	Kegiatan Penyusunan Buku Kecamatan Dalam Angka	Tersusunnya Buku Kecamatan Dalam Angka	Data Kecamatan Dalam Angka	170 buku	30.000.000	170 buku	33.000.000	170 buku	36.300.000	170 buku	39.930.000	170 buku	43.923.000	170 buku	43.923.000	BAPPEDA Kab. Karanganyar	BAPPEDA Kab. Karanganyar
5.	Kegiatan Penyusunan Buku Indeks Harga Konsumen	Tersusunnya Buku Indeks Harga Konsumen	Indeks Harga Konsumen	150 buku	20.000.000	150 buku	22.000.000	150 buku	24.200.000	150 buku	26.620.000	150 buku	29.282.000	150 buku	29.282.000	BAPPEDA Kab. Karanganyar	BAPPEDA Kab. Karanganyar
6.	Kegiatan Penyusunan Buku Indikator Ekonomi	Tersusunnya Buku Indikator Ekonomi dan Buku Inflasi	Indikator Ekonomi dan Inflasi	100 buku	20.000.000	100 buku	22.000.000	100 buku	24.200.000	100 buku	26.620.000	100 buku	29.282.000	100 buku	29.282.000	BAPPEDA Kab. Karanganyar	BAPPEDA Kab. Karanganyar

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
			Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
7.	Kegiatan Penyusunan Buku Karanganyar Dalam Angka	Tersusunnya Buku Karanganyar Dalam Angka	Data Kabupaten Karanganyar Dalam Angka	150 buku	50.000.000	150 buku	55.000.000	150 buku	60.500.000	150 buku	66.550.000	150 buku	73.205.000	150 buku	73.205.000	BAPPEDA Kab. Karanganyar	BAPPEDA Kab. Karanganyar
8.	Kegiatan Penyusunan Buku Produk Domestik Regional Bruto	Tersusunnya Buku Produk Domestik Regional Bruto	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Karanganyar	150 buku	35.000.000	150 buku	38.500.000	150 buku	42.350.000	150 buku	46.585.000	150 buku	51.243.500	150 buku	51.243.500	BAPPEDA Kab. Karanganyar	BAPPEDA Kab. Karanganyar
9.	Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah	(a) Tersusunnya Buku 8 Kelompok Data Profil Daerah, (b) Tersusunnya Album Peta Kemiskinan	Buku 8 Kelompok Data Profil Daerah dan Album Peta Kemiskinan	109 buku dan 25 Album	95.000.000	109 buku dan 25 Album	104.500.000	109 buku dan 25 Album	114.950.000	109 buku dan 25 Album	126.445.000	109 buku dan 25 Album	139.089.500	109 buku dan 25 Album	139.089.500	BAPPEDA Kab. Karanganyar	BAPPEDA Kab. Karanganyar
Program Perencanaan Pembangunan Daerah																	
10.	Kegiatan Pelayanan Penerbitan Ijin Riset/Survey	Terbitnya ijin riset /survey selama 12 bulan	Terbitnya ijin riset /survey selama 12 bulan	12 bulan	10.000.000	12 bulan	11.000.000	12 bulan	12.100.000	12 bulan	13.310.000	12 bulan	14.641.000	12 bulan	14.641.000	BAPPEDA Kab. Karanganyar	BAPPEDA Kab. Karanganyar
11.	Kegiatan Pembinaan Desa Inovasi	Terbina desa inovasi di Kabupaten Karanganyar	Terbina desa inovasi di Kabupaten Karanganyar	3 desa	15.000.000	3 desa	16.500.000	3 desa	18.150.000	3 desa	19.965.000	3 desa	21.961.500	3 desa	21.961.500	BAPPEDA Kab. Karanganyar	BAPPEDA Kab. Karanganyar
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi																	
12.	Kegiatan Forum Pengembangan Ekonomi Daerah dan Penciptaan Lapangan Kerja (FEDEP)	(a) Terlaksananya kegiatan FEDEP dengan tertib dan lancar selama 12 bulan (b) Terbinanya kluster UKM yang mandiri dan terfasilitasinya kegiatan 3 kluster	(a) Terlaksananya kegiatan FEDEP dengan tertib dan lancar selama 12 bulan (b) Terbinanya kluster UKM yang mandiri dan terfasilitasinya kegiatan 3 kluster	12 bulan untuk 3 kluster	155.000.000	12 bulan untuk 3 kluster	170.500.000	12 bulan untuk 3 kluster	187.550.000	12 bulan untuk 3 kluster	206.305.000	12 bulan untuk 3 kluster	226.935.500	12 bulan untuk 3 kluster	226.935.500	BAPPEDA Kab. Karanganyar	BAPPEDA Kab. Karanganyar

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
			Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
13.	Kegiatan Pemetaan Potensi Ekonomi Daerah	Tersusunnya Buku Pemetaan Potensi Ekonomi Daerah	Buku Pemetaan Potensi Ekonomi Daerah	40 buku	50.000.000	40 buku	55.000.000	40 buku	60.500.000	40 buku	66.550.000	40 buku	73.205.000	40 buku	73.205.000	BAPPEDA Kab. Karanganyar	BAPPEDA Kab. Karanganyar
Program Perencanaan Sosial dan Budaya																	
14.	Kegiatan BOP pelaksanaan KKN dan Pemberdayaan Masyarakat Bagi Perguruan Tinggi	Terfasilitasinya pemohon fasilitas KKN	Terfasilitasinya pemohon fasilitas KKN	2 Perguruan Tinggi	20.000.000	2 Perguruan Tinggi	22.000.000	2 Perguruan Tinggi	24.200.000	2 Perguruan Tinggi	26.620.000	2 Perguruan Tinggi	29.282.000	2 Perguruan Tinggi	29.282.000	BAPPEDA Kab. Karanganyar	BAPPEDA Kab. Karanganyar
15.	Kegiatan Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH)	Terlaksananya fasilitasi koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 17 kecamatan di Kabupaten Karanganyar	Terfasilitasinya koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 17 kecamatan di Kabupaten Karanganyar	17 kecamatan	75.000.000	17 kecamatan	82.500.000	17 kecamatan	90.750.000	17 kecamatan	99.825.000	17 kecamatan	109.807.500	17 kecamatan	109.807.500	BAPPEDA Kab. Karanganyar	BAPPEDA Kab. Karanganyar
16.	Kegiatan BOP PNPB Mandiri di Perkotaan P2KP (reguler)	(a) Operasional PNPB Mandiri P2KP (reguler) di 51 desa di 5 kecamatan (Jaten, Colomadu, Karanganyar, Tasikmadu, Kebakkramat) (b) Bantuan Keuangan Korkot PNPB Mandiri Perkotaan	(a) Operasional PNPB Mandiri P2KP (reguler) di 51 desa di 5 kecamatan (Jaten, Colomadu, Karanganyar, Tasikmadu, Kebakkramat) (b) Bantuan Keuangan Korkot PNPB Mandiri Perkotaan	51 desa di 5 kecamatan (Jaten, Colomadu, Karanganyar, Tasikmadu, Kebakkramat)	150.000.000	51 desa di 5 kecamatan (Jaten, Colomadu, Karanganyar, Tasikmadu, Kebakkramat)	165.000.000	51 desa di 5 kecamatan (Jaten, Colomadu, Karanganyar, Tasikmadu, Kebakkramat)	181.500.000	51 desa di 5 kecamatan (Jaten, Colomadu, Karanganyar, Tasikmadu, Kebakkramat)	199.650.000	51 desa di 5 kecamatan (Jaten, Colomadu, Karanganyar, Tasikmadu, Kebakkramat)	219.615.000	51 desa di 5 kecamatan (Jaten, Colomadu, Karanganyar, Tasikmadu, Kebakkramat)	219.615.000	BAPPEDA Kab. Karanganyar	BAPPEDA Kab. Karanganyar
17.	Kegiatan Fasilitasi Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK)/ Neighbourhood Development (ND)	Terwujudnya data pelaksanaan PLP-BK/ND di 16 desa/kelurahan	Data Pelaksanaan PLP-BK/ND di 16 desa/kelurahan	16 desa/kelurahan	50.000.000	16 desa/kelurahan	55.000.000	16 desa/kelurahan	60.500.000	16 desa/kelurahan	66.550.000	16 desa/kelurahan	73.205.000	16 desa/kelurahan	73.205.000	BAPPEDA Kab. Karanganyar	BAPPEDA Kab. Karanganyar

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
			Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
18. Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Kelancaran pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Buku KK Miskin dan Laporan Kegiatan	3 kali rapat koordinasi, 5 kali rapat POKJA, Buku KK Miskin dan Laporan Kegiatan	150.000.000	3 kali rapat koordinasi, 5 kali rapat POKJA, Buku KK Miskin dan Laporan Kegiatan	165.000.000	3 kali rapat koordinasi, 5 kali rapat POKJA, Buku KK Miskin dan Laporan Kegiatan	181.500.000	3 kali rapat koordinasi, 5 kali rapat POKJA, Buku KK Miskin dan Laporan Kegiatan	199.650.000	3 kali rapat koordinasi, 5 kali rapat POKJA, Buku KK Miskin dan Laporan Kegiatan	219.615.000	3 kali rapat koordinasi, 5 kali rapat POKJA, Buku KK Miskin dan Laporan Kegiatan	219.615.000	BAPPEDA Kab. Karanganyar	BAPPEDA Kab. Karanganyar
19. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Untuk Semua (PUS)	Terfasilitasinya kegiatan Pengembangan Pendidikan Untuk Semua (PUS)	Laporan Tahunan PUS	2 kali rapat koordinasi, 8 kali rapat tim teknis dan Laporan Tahunan PUS	100.000.000	2 kali rapat koordinasi, 8 kali rapat tim teknis dan Laporan Tahunan PUS	110.000.000	2 kali rapat koordinasi, 8 kali rapat tim teknis dan Laporan Tahunan PUS	121.000.000	2 kali rapat koordinasi, 8 kali rapat tim teknis dan Laporan Tahunan PUS	133.100.000	2 kali rapat koordinasi, 8 kali rapat tim teknis dan Laporan Tahunan PUS	146.410.000	2 kali rapat koordinasi, 8 kali rapat tim teknis dan Laporan Tahunan PUS	146.410.000	BAPPEDA Kab. Karanganyar	BAPPEDA Kab. Karanganyar
20. Kegiatan Koordinasi Bidang Agama, Pendidikan, Kesehatan Kebudayaan dan KESRA				30.000.000		33.000.000		36.300.000		39.930.000		43.923.000		43.923.000	BAPPEDA Kab. Karanganyar	BAPPEDA Kab. Karanganyar
21. Kegiatan BOP Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pencapaian Tujuan MDGs				50.000.000		55.000.000		60.500.000		66.550.000		73.205.000		73.205.000	BAPPEDA Kab. Karanganyar	BAPPEDA Kab. Karanganyar
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam																
22. Kegiatan Pendampingan Water Resources & Irrigations Sector Management Program (WISMP)	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas program/kegiatan bidang irigasi selama 1 tahun	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas program/kegiatan bidang irigasi selama 1 tahun	1 tahun	55.000.000	1 tahun	60.500.000	1 tahun	66.550.000	1 tahun	73.205.000	1 tahun	80.525.500	1 tahun	80.525.500	BAPPEDA Kab. Karanganyar	BAPPEDA Kab. Karanganyar
23. Kegiatan Operasional POKJA Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)	Optimalisasi pelaksanaan program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) dan Sosialisasi PAMSIMAS selama 1 tahun	Buku MPPS	20 buku MPPS dan 17 kecamatan	113.000.000	20 buku MPPS dan 17 kecamatan	124.300.000	20 buku MPPS dan 17 kecamatan	136.730.000	20 buku MPPS dan 17 kecamatan	150.403.000	20 buku MPPS dan 17 kecamatan	165.443.300	20 buku MPPS dan 17 kecamatan	165.443.300	BAPPEDA Kab. Karanganyar	BAPPEDA Kab. Karanganyar

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
			Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
24.	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi (Water Resources & Irrigations Sector Management Program/ WISMP)	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas program/kegiatan bidang irigasi selama 1 tahun	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas program/kegiatan bidang irigasi selama 1 tahun	1 tahun	162.000.000	1 tahun	178.200.000	1 tahun	196.020.000	1 tahun	215.622.000	1 tahun	237.184.200	1 tahun	237.184.200	BAPPEDA Kab. Karanganyar	BAPPEDA Kab. Karanganyar
25.	Kegiatan Sosialisasi Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP)	Fasilitasi Sosialisasi PPIP untum 15 desa	Fasilitasi Sosialisasi PPIP untum 15 desa	15 desa	40.000.000	15 desa	44.000.000	15 desa	48.400.000	15 desa	53.240.000	15 desa	58.564.000	15 desa	58.564.000	BAPPEDA Kab. Karanganyar	BAPPEDA Kab. Karanganyar
26.	Kegiatan Pengadaan Peta Citra Satelit				100.000.000		110.000.000		121.000.000		133.100.000		146.410.000		146.410.000	BAPPEDA Kab. Karanganyar	BAPPEDA Kab. Karanganyar
Program Perencanaan Tata Ruang																	
27.	Kegiatan Operasional BKPRD	Terlaksananya kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten selama 1 tahun	Rencana pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten selama 1 tahun	1 tahun	100.000.000	1 tahun	110.000.000	1 tahun	121.000.000	1 tahun	133.100.000	1 tahun	146.410.000	1 tahun	146.410.000	BAPPEDA Kab. Karanganyar	BAPPEDA Kab. Karanganyar
28.	Kegiatan fasilitasi Tim Penataan Pembangunan Menara Telekomunikasi	terlayannya ijin lokasi pembangunan menara telekomunikasi selama 1 tahun	ijin lokasi pembangunan menara telekomunikasi	1 tahun	15.000.000	1 tahun	16.500.000	1 tahun	18.150.000	1 tahun	19.965.000	1 tahun	21.961.500	1 tahun	21.961.500	BAPPEDA Kab. Karanganyar	BAPPEDA Kab. Karanganyar
29.	Kegiatan Penyusunan RDTR Kecamatan di Kabupaten Karanganyar	(1) Tersusunnya Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan ; (2) Tersusunnya Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR Kecamatan	Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan dan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis	2 dokumen masing-masing 10 buku													

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
			Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Misi Keempat : Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang berkesinambungan																	
Program Perencanaan Pembangunan Daerah																	
1.	Kegiatan Penyusunan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2018	(a) Tersusunnya Perda mengenai RPJMD kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2018 (b) Terselenggaranya Musrenbang RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2018	Perda mengenai RPJMD kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2018	(a) 1 dokumen (b) 300 orang	500.000.000											BAPPEDA Kab. Karanganyar	BAPPEDA Kab. Karanganyar
Program/Kegiatan Pendukung tercapainya Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran BAPPEDA Kabupaten Karanganyar																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran dan surat menyurat	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran dan surat menyurat	2.500 surat	2.640.000	2.500 surat	2.904.000	2.500 surat	3.194.400	2.500 surat	3.513.840	2.500 surat	3.865.224	2.500 surat	3.865.224	BAPPEDA Kab. Karanganyar	BAPPEDA Kab. Karanganyar
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet	12 bulan	61.380.000	12 bulan	67.518.000	12 bulan	74.269.800	12 bulan	81.696.780	12 bulan	89.866.458	12 bulan	89.866.458	BAPPEDA Kab. Karanganyar	BAPPEDA Kab. Karanganyar
3.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terbayarnya jasa petugas kebersihan	Terbayarnya jasa petugas kebersihan	13 bulan, 5 oran	61.380.000	13 bulan, 5 oran	67.518.000	13 bulan, 5 oran	74.269.800	13 bulan, 5 oran	81.696.780	13 bulan, 5 oran	89.866.458	13 bulan, 5 oran	89.866.458	BAPPEDA Kab. Karanganyar	BAPPEDA Kab. Karanganyar
4.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	7.032.300	12 bulan	7.735.530	12 bulan	8.509.083	12 bulan	9.359.991	12 bulan	10.295.990	12 bulan	10.295.990	BAPPEDA Kab. Karanganyar	BAPPEDA Kab. Karanganyar
5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	5.500.000	12 bulan	6.050.000	12 bulan	6.655.000	12 bulan	7.320.500	12 bulan	8.052.550	12 bulan	8.052.550	BAPPEDA Kab. Karanganyar	BAPPEDA Kab. Karanganyar
6.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	1.325.500	12 bulan	1.458.050	12 bulan	1.603.855	12 bulan	1.764.241	12 bulan	1.940.665	12 bulan	1.940.665	BAPPEDA Kab. Karanganyar	BAPPEDA Kab. Karanganyar
7.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 bulan	1.769.900	12 bulan	1.946.890	12 bulan	2.141.579	12 bulan	2.355.737	12 bulan	2.591.311	12 bulan	2.591.311	BAPPEDA Kab. Karanganyar	BAPPEDA Kab. Karanganyar
8.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya surat kabar, buku pustaka dan perauran perundangan	Tersedianya surat kabar, buku pustaka dan perauran perundangan	2 media cetak, buku pustaka, peraturan perundangan	3.850.000	2 media cetak, buku pustaka, peraturan perundangan	4.235.000	2 media cetak, buku pustaka, peraturan perundangan	4.658.500	2 media cetak, buku pustaka, peraturan perundangan	5.124.350	2 media cetak, buku pustaka, peraturan perundangan	5.636.785	2 media cetak, buku pustaka, peraturan perundangan	5.636.785	BAPPEDA Kab. Karanganyar	BAPPEDA Kab. Karanganyar

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
			Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
9.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat koordinasi	Tersedianya makanan dan minuman rapat koordinasi	850 orang	22.907.500	850 orang	25.198.250	850 orang	27.718.075	850 orang	30.489.883	850 orang	33.538.871	850 orang	33.538.871	BAPPEDA Kab. Karanganyar	BAPPEDA Kab. Karanganyar
10.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam/Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi	1 tahun	82.500.000	1 tahun	90.750.000	1 tahun	99.825.000	1 tahun	109.807.500	1 tahun	120.788.250	1 tahun	120.788.250	BAPPEDA Kab. Karanganyar	BAPPEDA Kab. Karanganyar
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																	
1.	Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	12 bulan	34.258.400	12 bulan	37.684.240	12 bulan	41.452.664	12 bulan	45.597.930	12 bulan	50.157.723	12 bulan	50.157.723	BAPPEDA Kab. Karanganyar	BAPPEDA Kab. Karanganyar
2.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 bulan	13.776.400	12 bulan	15.154.040	12 bulan	16.669.444	12 bulan	18.336.388	12 bulan	20.170.027	12 bulan	20.170.027	BAPPEDA Kab. Karanganyar	BAPPEDA Kab. Karanganyar
3.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	12 bulan	157.077.800	12 bulan	172.785.580	12 bulan	190.064.138	12 bulan	209.070.552	12 bulan	229.977.607	12 bulan	229.977.607	BAPPEDA Kab. Karanganyar	BAPPEDA Kab. Karanganyar
4.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan gedung kantor	12 bulan	4.400.000	12 bulan	4.840.000	12 bulan	5.324.000	12 bulan	5.856.400	12 bulan	6.442.040	12 bulan	6.442.040	BAPPEDA Kab. Karanganyar	BAPPEDA Kab. Karanganyar
5.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12 bulan	8.800.000	12 bulan	9.680.000	12 bulan	10.648.000	12 bulan	11.712.800	12 bulan	12.884.080	12 bulan	12.884.080	BAPPEDA Kab. Karanganyar	BAPPEDA Kab. Karanganyar
6.	Pemeliharaan Web Site BAPPEDA	terlaksananya pembaharuan (up dating) data web site	terlaksananya pembaharuan (up dating) data web site	12 bulan	5.000.000	12 bulan	5.500.000	12 bulan	6.050.000	12 bulan	6.655.000	12 bulan	7.320.500	12 bulan	7.320.500	BAPPEDA Kab. Karanganyar	BAPPEDA Kab. Karanganyar

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi			
			Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																	
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	terlaksananya pengiriman peserta kursus-kursus singkat dan pelatihan SDM perencana	terlaksananya pengiriman peserta kursus-kursus singkat dan pelatihan SDM perencana	3 orang	11.000.000	3 orang	12.100.000	3 orang	13.310.000	3 orang	14.641.000	3 orang	16.105.100	3 orang	16.105.100	BAPPEDA Kab. Karanganyar	BAPPEDA Kab. Karanganyar
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																	
1.	Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(a) Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja BAPPEDA (b) Tersusunnya Laporan Semesteran © Tersusunnya Laporan pelaksanaan Tugas BAPPEDA (d) tersusunnya Laporan Tahunan	(a) Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja BAPPEDA (b) Tersusunnya Laporan Semesteran © Tersusunnya Laporan pelaksanaan Tugas BAPPEDA (d) tersusunnya Laporan Tahunan	(a) 9 buku (b) 9 buku © 9 buku (d) 9 buku	73.029.000	(a) 9 buku (b) 9 buku © 9 buku (d) 9 buku	80.331.900	(a) 9 buku (b) 9 buku © 9 buku (d) 9 buku	88.365.090	(a) 9 buku (b) 9 buku © 9 buku (d) 9 buku	97.201.599	(a) 9 buku (b) 9 buku © 9 buku (d) 9 buku	106.921.759	(a) 9 buku (b) 9 buku © 9 buku (d) 9 buku	106.921.759	BAPPEDA Kab. Karanganyar	BAPPEDA Kab. Karanganyar
2.	Penyusunan DPA dan RKA	Terwujudnya tertib administrasi keuangan	Tersusunnya dokumen DPA dan RKA	2 dokumen	5.000.000	2 dokumen	5.500.000	2 dokumen	6.050.000	2 dokumen	6.655.000	2 dokumen	7.320.500	2 dokumen	7.320.500	BAPPEDA Kab. Karanganyar	BAPPEDA Kab. Karanganyar

BAB VI
INDIKATOR KINERJA BAPPEDA
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Sebagaimana diketahui bahwa INDIKATOR KINERJA merupakan STANDAR KINERJA (performance) yang harus dicapai yang berguna sebagai bukti pencapaian kinerja tentang Kuantitas, Kualitas, Waktu dan Lokasi suatu program dan kegiatan dilaksanakan. Disamping itu Indikator Kinerja juga bermanfaat untuk dasar Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan.

Tabel 6.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Jumlah program nasional yang dilaksanakan	1	1	1	1	1	1	1
2.	Jumlah program provinsi yang dilaksanakan							
3.	Frekuensi penyelenggaraan forum perencanaan interaktif dan penjangkaran aspirasi masyarakat	3	3	3	3	3	3	3
4.	Fasilitas/prasarana informasi : a. Papan pengumuman b. Leaflet c. Pos Pengaduan d. Pengumuman di mass media / web site	Ada Ada Ada Ada	Ada Ada Ada Ada	Ada Ada Ada Ada	Ada Ada Ada Ada	Ada Ada Ada Ada	Ada Ada Ada Ada	Ada Ada Ada Ada
5.	Persentase program/kegiatan Renja SKPD yang diakomodir dalam RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Persentase pelaksanaan program/kegiatan yang tepat waktu dan tepat sasaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Persentase penjabaran program RPJMD	50%	50%	50%	55%	55%	55%	55%

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	ke RKPD PERDA							
8.	Persentase program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9.	Persentase program RENJA RKPD yang diakomodir dalam DPA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10.	Hasil kajian perencanaan pembangunan yang bersifat sektoral/ bidang (Ada/Tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
11.	Data/informasi bidang pembangunan	3	3	3	3	3	3	3
12.	Dokumen perencanaan sebagai acuan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan Perda/Perbup (Ada/Tidak) :							
	a. RPJPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	b. RPJMD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	c. RKPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	d. RENSTRA SKPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	e. RENJA SKPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	f. KUA PPAS	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	g. RTRW	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Perumusan “INDIKATOR KINERJA HASIL” Pelayanan BAPPEDA

SASARAN DALAM RPJMD YANG SESUAI DENGAN PELAYANAN BAPPEDA	INDIKATOR KINERJA HASIL PELAYANAN BAPPEDA	PROGRAM DALAM RENSTRA SKPD
1	2	3
	Jumlah informasi perencanaan pembangunan	
	Jumlah kerjasama pembangunan antar daerah	
	Tingkat disparitas pembangunan antar subwilayah	
	Tingkat kelengkapan rencana wilayah strategis	
	Tingkat kelengkapan rencana kawasan cepat tumbuh	
	Tingkat penanganan perencanaan wilayah tertinggal	
	Tingkat penanganan wilayah strategis	
	Tingkat penanganan wilayah cepat tumbuh	
	Tingkat penanganan perkembangan pusat-pusat kegiatan wilayah	
	Tingkat kesesuaian antara perencanaan pusat kegiatan dengan perkembangan actual	
	Tingkat penerapan perencanaan partisipatif	
	Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan daerah	
	Tingkat kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	
	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan daerah	
	Tingkat implementasi dokumen perencanaan daerah	
	Kualitas pelaksanaan Musrenbang	

Kode	Program	Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Keluaran	Target Kinerja Capaian Program (tahun)					SKPD Penunjang	Pagu Indikatif (tahun)				
				I	II	III	IV	V		I	II	III	IV	V
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)				
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Kegiatan Penyediaan Jasa surat menyurat												
	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur													
	3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur													
	4. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan													
	5. Program Pengembangan Data / Informasi													
	6. Program													

	Kerjasama Pembangunan														
	7. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar														
	8. Program Perencanaan Pembangunan Daerah														
	9. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi														
	10. Program Perencanaan Sosial Budaya														
	11. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam														

Keterangan:

- (1) diisi dengan kode program/kegiatan sesuai Permendagri 13/2006 dan perubahannya
- (2) diisi dengan judul program
- (3) diisi dengan judul kegiatan pokok/utama dari program ybs

- (4) diisi dengan tolok ukur kinerja yang dapat membantu menunjukkan macam keluaran/output program
- (5) diisi dengan target cakupan pelayanan/target keluaran program
- (6) diisi dengan SKPD lain yang bekerjasama dalam penanganan program ybs
- (7) diisi dengan perkiraan besar dana yang perlu dialokasikan untuk menjalankan program ybs

Catatan hasil konsultasi

- 1) Kewajaran dan kelayakan target kinerja capaian program
- 2) Kewajaran pagu indikatif (biaya satuan keluaran kegiatan)
- 3) Identifikasi strategi untuk mempertahankan pagu indikatif pada pembahasan anggaran
- 4) perbandingan total pagu indikatif tahun rencana dan tahun lalu guna menilai kewajaran tingkat kenaikan pagu

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 – 2018 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur BAPPEDA dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholder yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi BAPPEDA yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar.

Dalam melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur BAPPEDA, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholder sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata. Semoga Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.

Karanganyar, November 2014
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

SUNDORO, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610512 198812 1 001